

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KECAMATAN PUDAK TAHUN 2025**



**PENERINTAH KABUPATEN POHOROGO
KECAMATAN PUDAK**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjakan puji syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkah, ihsan dan karunia-Nya Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Padak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 ini bisa selesai termasuk sebagai bentuk laporan kinerja selang-seling jabatan dan diberitahikan dan dipaparkan dari Kecamatan Padak kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai semua program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang pengakuan sistematis dan berbagai indikator, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengelompokan, penghitungan dan pelaporan.

Kinerja pada intinya pemerintah dalam menaruh kewajiban untuk bertanggung jawab dan memenuhi dan berupaya pelaksanaan masyarakat, serta cara berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan paparan kinerja serta berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penjabaran Kinerja, Pelaksanaan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian ini Laporan Kinerja (LK) ini juga digunakan sebagai acuan evaluasi dalam pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Padak sehingga dapat diketahui masalah-masalah dan hambatan-hambatan yang dihadapi dan selanjutnya dapat digunakan sebagai titik tolak dan bahan perencanaan maupun kegiatan. Tidak lupa dimasa yang akan datang agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Atasnya kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LK) Kecamatan Padak Tahun 2025.

Ponorogo, 31 Desember 2025



Ditandatangani
Panglima
No: 180/2025/160001/1/010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	
1.2 PERUMUSAN RUMUSAN PROBLEMA	
1.3 FORMULASI MASALAH UTAMA	
1.4 DOKUMEN ALIRAN KERJA	
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN KENDRA	
BAB II PERENCANAAN KERJA	
2.1 TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/ST/DEKOR	
2.2 RENCANA KERJA TAHUN 2023	
2.3 PERJALANAN KERJA TAHUN 2023	
BAB III AKTIVITAS KERJA	
3.1 GAMBAR KENDRA DIRIAN SUDUT/INDUCED TABEL	
3.1.1 Menentukan besar sudut dari suatu sisi pada segitiga	
3.1.2 Menentukan besar sisi pada suatu segitiga dengan diketahui dua sisi dan satu sudut atau dua sudut dan satu sisi	
3.1.3 Menentukan suatu sisi pada suatu segitiga dengan diketahui dua sisi dan satu sudut atau dua sudut dan satu sisi	
3.1.4 Menentukan suatu sisi pada suatu segitiga dengan diketahui dua sisi dan satu sudut atau dua sudut dan satu sisi	
3.1.5 Analisis penyebab kesalahan/kegagalan atau kegagalan Perencanaan kerja berdasarkan teori yang sudah dipelajari	
3.1.6 Analisis cara mengatasi kegagalan/kesalahan kerja	
3.1.7 Analisis penyebab kegagalan yang mungkin terjadi dalam kegiatan/kegiatan pembelajaran/kegiatan lainnya	
3.2 REALISASI ANDARAN	
BAB IV PENUTUP	
4. Kesimpulan	
4. Saran	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- B.L	

- MATA KEMAHIRAN
- REVOLUSI PERUBAHAN NEGARA TAHUN 2020
- REVOLUSI KEBERUSAHAAN TAHUN 2020
- PENGAKHIRAN NEGARA TAHUN 2020

PENGKALASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong lebih banyak pemerintahan yang baik dimana instansi pemerintah, melibatkan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Proses perbaikan yang tertera ini juga menjadi bagian dari strategi pembelajaran organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapabilitas kelembagaan sehingga kinerja yang lebih baik dapat dihasilkan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) ini dilakukan dengan memperhatikan pada Peraturan Menteri Peningkatan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2016, dimana pelaksanaan urusan kinerja organisasi secara terpadu dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atau kinerja Kecamatan Pucak.

Capaian Kinerja Kecamatan Pucak Kabupaten Pangrapo selama Tahun 2020 menunjukkan ketercapaian baik pada sasaran meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan maupun pada sasaran Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan dan Pemberian Penyempurnaan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

Secara capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan				
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	90	92,50	90,56	Sangat Baik
Sasaran Strategis II				

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan, Keefektifan dan Kemandirian dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan.

Indikator Kinerja	TARGET	KUALITAS	% TAPAKAN	PROGRES
Proses dan hasil yang terdapat Year 2019.	100	100	100	TARGET TERKAPAI

Sebagai landasan tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Pulaok mencapai 100% dan dapat dikategorikan sangat berhasil

Selanjutnya permasalahan / kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai tujuan adalah:

- a. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dilaksananya.
- b. Tersedianya Struktur Organisasi dengan kepastian peran masing masing jabatan / maupun pelaksanaan kerja dan tidak ada.
- c. Tersedianya Sistem Informasi yang akurat dalam bidang pelayanan publik.
- d. Tersedianya Anggaran Penerimaan Minimal (SPM) digunakan untuk semua sar dan tidak ada dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Adapun faktor faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Belum berubahnya perilaku pejabat dan terti dalam kehidupan masyarakat.

1.2 PENJELASAN UMUM ORGANISASI

1. Kondisi Geografi

Secara geografis, Kalimantan Utara terletak antara 0° lintang dan 000° bujur dengan 174 milimeter iklim di atas laut dengan luas wilayah 50.001 km² yang secara administratif terbagi dalam 5 kabupaten.

1. Kota Berau
2. Kota Tarakan
3. Kota Kutai
4. Kota Pukan Hulu
5. Kota Pukan Melayu
6. Kota Singkep

Secara fisik wilayah Kalimantan Utara

- | | | | | |
|-------------|---|-----------------|---|-------------------|
| Batas utara | - | Sekeloa | - | Kelurahan Singkep |
| | | Kuala Kutai | - | Kelurahan Tarakan |
| | | Kelurahan Kutai | - | Kelurahan Singkep |
| | | Kelurahan Kutai | - | Kelurahan Singkep |

Tabel 1.1

**Sampelnya Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW),
dan Dusun Dalam Mergul Desa di
Kecamatan Puloh
Tahun 2016**

No.	DESA	RUKUN TETANGGA (RT)	RUKUN WARGA (RW)	DUSUN
1.	Batang	20	8	4
2.	Tanjung	8	2	2
3.	Katik	12	5	3
4.	Pada Katin	8	4	2
5.	Pada Wener	11	4	4
6.	Sarongje	24	8	4
	JMLAH	63	21	19

**PETA WILAYAH BELAJARAN PUGUR
KABUPATEN PUNDIRAJAN**



- LEGENDA**
- Batas Kecamatan
 - Batas Desa
 - Jalan Kabupaten
 - Jalan Desa
 - Perkeretaapian
 - Perairan
 - Lokasi Penelitian

Disusun oleh:
Yusuf HARTATI
 NIM. 1111000101

Di susun dan dibuat
 pada tanggal 10 April 2019
 di Pundarijan

3. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil registrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padangjuru, jumlah penduduk di Kecamatan Padak Tuluh sampai dengan akhir tahun 2020 adalah sebanyak 8683 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki sebanyak 4830 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 4033 jiwa.

Terdapat data jumlah penduduk di Kecamatan Padak Tuluh dapat dijabarkan sebagaimana di tabel (juga tabel di bawah ini).

Tabel 1.2
BANYAKNYA KEPALA KELUARGA DAN PENDUJUK
DIRINCI MENURUT JENIS KELAMIN DAN DESA
DI KECAMATAN PADAK TULUH 2020

DESA	KEPALA KELUARGA	PENDUJUK		
		LAKILAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Baling	876	1.000	1.122	2.122
Pandayang	118	138	85	223
Kulak	438	631	627	1.258
Pulau Selayan	881	888	925	1.813
Padak Tuluh	1.085	1.294	1.364	2.658
Pulau Kubat	312	378	322	700
JUMLAH	3.821	4.830	4.813	9.643

Jumlah Penduduk

- Jumlah laki – laki	4.830 jiwa
- Jumlah perempuan	4.813 jiwa
Jumlah penduduk seluruhnya	9.643 jiwa
Jumlah KK	3.821 jiwa

Sementara itu, data tentang konsentrasi penduduk Kecamatan Pudak berdasarkan usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dapat ditunjukkan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2025

KELOMPOK UMUR	PENDUDUK		
	LAKSANA	PEREMPULAN	JUMLAH
0 - 4	374	378	752
5 - 9	388	391	779
10 - 24	601	785	1.386
25 - 39	2.410	2.491	4.901
40 - 64	1.603	1.581	3.184
JUMLAH	4.300	4.033	8.333

Tabel 1.4
BANYAKNYA PENDUDUK DIRINCI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN DESA DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2025

DESA	TAMAT PENDU- SIAN TAMAT	TAMAT SLTA	TAMAT SLTP	TAMAT SD	BELUM / TIDAK TAMAT SD	JULAH / JUMLAH SEDOLAH
Wring	38	208	275	527	164	305
Tambak	25	103	168	238	147	130
Kras	18	125	208	368	142	190
Pudak Barat	33	158	167	311	74	288
Pudak Watan	68	212	411	688	121	294
Kumpang	52	303	495	1.104	178	441
JUMLAH	202	1.121	2.611	3.641	876	1.381

TABEL 1.5
BANYAKNYA PENDUDUK
DIKINCI MENURUT MATA PENCAHARIAN DAN DESA
DI KECAMATAN PUDAK TAHUN 2025

DESA	PETANIS PENDUDUK	MURAH TANI	PENYUSUN PENDUDUK	DIKINCI PENDUDUK	PENYUSUN PENDUDUK	MURAH TANI	PETANIS PENDUDUK
Bering	80	0	13				16
Tambora	208	2	7				6
Krak	203	0	0				7
Pudak Kulon	305	2	0				7
Pudak Wetan	811	0	0				9
Banjara	106	2	12				12
JUMLAH	2016	11	42				58

Lanjutan Tabel:

DESA	PENDANISAN	ANAKITAN	WAL	PEDAJANG SARITIS	TR- POLIS	PENYUSUN
Bering	21	12	22	20	0	4
Tambora	0	5	16	7	2	2
Krak	30	7	17	100	-	1
Pudak Kulon	20	0	15	14	-	3
Pudak Wetan	20	0	24	20	-	3
Banjara	20	12	13	30	1	3
JUMLAH	110	48	127	110	6	28

3. Kondisi Eksistensi

Potensi Unggulan Kecamatan Kucur

Potensi Perairan, Perikanan, dan Perikanan berada di sebagian besar Wilayah Desa – Desa di Kecamatan Kucur. Sedangkan potensi wisata berada hampir di semua desa dengan beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang terdapat produk unggulan Kecamatan Kucur. Potensi wisata resmi banyak lagi potensi wisata yang bisa menunjang perkembangan pariwisata yang menghimpun para wisatawan masyarakat sehingga bisa sehingga terjadi. Maka pendukung kegiatan Pemerintah Daerah yang meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka mengedukasi para wisatawan yang akan dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik seperti dengan media via Kabupaten Ponorogo.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Pokok dibuat sesuai berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo adalah merupakan perangkat daerah terkecil sebagai pelaksana teknis kebijakan yang mempunyai wewenang, tugas, fungsi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari instansi. Gambaran dasar, menunjukkan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas

1. Menyiapkan laporan perkembangan masyarakat;
2. Menyiapkan perencanaan pembangunan berdasarkan dan kebijakan umum;
3. Menyiapkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang terdapat anggaran;
4. Menyiapkan pelaksanaan pelayanan dan fasilitas pelayanan umum;
5. Menyiapkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di regional kecamatan;
6. Melaksanakan koordinasi dalam lingkup tugas dan letak pemerintahan;
7. Melaksanakan tugas sesuai dan program pemerintahan yang dilaksanakan oleh aparat uraian bertanggung sebagai urusan khusus daerah.

1. Fungsi:

- a. Melakukan supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar pembangunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas administrasi wilayah;
- c. Pelaksanaan koordinasi sebagai SKPD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan alokasi dana perimbangan sebagai SKPD dan instansi vertikal di tingkat wilayah;
- e. Pelaksanaan urusan yang menyangkut pemerintahan wilayah;
- f. Pelaksanaan penanggulangan permasalahan kecamatan seperti banjir;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1. Deskripsi kesatuan kerja:

- a. Camat yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten:
 1. Menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertibatan dan ketertibatan umum;
 4. Mengkoordinasikan pendanaan anggaran dan sarana umum;
 5. Mengkoordinasikan pemetaan dan pemukiman Perdes dan Perdesakur Banjar;
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dibebankan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
 9. Melaksanakan tugas lain yang dipercayakan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana kerja kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;

- b. Pelaksanaan tugas-tugas administrasi wilayah.
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan DPRD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan DPRD dan instansi vertikal di wilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pengkajian pemerintah Kecamatan.
- f. Pelaporan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan kepada Bupati.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretaris Kecamatan, merupakan tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kecamatan, evaluasi dan penilaian, administrasi umum, administrasi keuangan, ketugastambahan dan urusan tugas kecamatan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas lainnya;
- 2) Menjalankan tugas pelayanan administrasi;
- 3) Mengelola administrasi keuangan dan pengelolaan keuangan;
- 4) Mengelola administrasi ketugastambahan dan ketugastambahan;
- 5) Mengelola urusan ketugastambahan ketugastambahan dan ketugastambahan;
- 6) Penyelenggaraan urusan ketugastambahan ketugastambahan ketugastambahan;
- 7) Penyelenggaraan administrasi umum dan pelayanan;
- 8) Penyelenggaraan pelayanan umum di kecamatan;
- 9) Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.

a. Sekretariat Kecamatan terdiri:

- 1) Sub bagian urusan dan ketugastambahan;
- 2) Sub bagian keuangan, penyelenggaraan ketugastambahan dan ketugastambahan.

b. Tugas dan fungsi Sekretaris Kecamatan:

- 1) Sub Bagian Umum dan Ketugastambahan, merupakan tugas melaksanakan penyelenggaraan ketugastambahan administrasi umum, urusan ketugastambahan dan ketugastambahan.

- (1) Pengawasan dan pembinaan secara terus-menerus dan berkala terhadap di lingkungan kabupaten
 - (2) Pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan/kabupaten
 - (3) Penyusunan dan pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pelayanan publik
 - (4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi secara di lingkungan kabupaten
 - (5) Penyelenggaraan koordinasi, humas dan pelayanan publik
 - (6) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan di lingkungan kabupaten
 - (7) Pelaksanaan dan kegiatan kabupaten
 - (8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan Sekretaris Kecamatan
2. **Silo Doger** (struktur) Penyusunan Program dan Kegiatan, mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan kabupaten kabupaten, mempunyai fungsi:
- (1) Penyusunan dan pelaksanaan anggaran belanja kabupaten
 - (2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan kabupaten
 - (3) Pelaksanaan laporan dan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengalihan keuangan kabupaten
 - (4) Penyusunan dan koordinasi penyusunan rencana kerja kabupaten
 - (5) Pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan kabupaten
 - (6) Pelaksanaan dan laporan pelaksanaan kegiatan kabupaten dan
 - (7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan dan Sekretaris Kecamatan
- c. **Seksi Tata Pemerintahan** mempunyai tugas melaksanakan urusan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, pemerintahan dilaksanakan oleh administrasi kependudukan dan pemerintahan kabupaten

Fungsi Seksi Tata Pemerintahan:

- 1) Penyajian bahan dasar rangka administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa adat/daerah adat
- 2) Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi dasar dan tata kependudukan
- 3) Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, pemeliharaan penyusutan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
- 4) Penyajian bahan koordinasi dan bantuan penyajian pemerintahan, penyelenggaraan dan pemerintahan kepala desa dan perangkat desa lainnya

- 1) Pelayanan dalam tindakan dan pelaksanaan tindakan di ruang perawatan, yaitu tindakan dasar meliputi tindakan:
- 2) Pelaksanaan tindakan keperawatan yang di lakukan menggunakan prosedur dan
- 3) Pelaksanaan keperawatan lain yang diberikan oleh Dokter.

g. Rasio Keperawatan Umum

1. **Sifat Pelayanan Umum** meliputi tugas menyiapkan bahan, tindakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai target kewaspadaan kamar rawat.
2. **Tugas melaksanakan tugas** dalam melaksanakan tindakan pada bagian (1) serta pelayanan umum meliputi sebagai berikut:
 - a. Pelayanan dalam tindakan tugas serta serta yang melibatkan dalam tugas pelaksanaan pelayanan umum di Kamar rawat.
 - b. Pelayanan dalam dalam tugas pelayanan umum di Kamar rawat.
 - c. Pelaksanaan kegiatan, tindakan, tindakan, dan pelaksanaan tindakan – tindakan keperawatan umum.
 - d. Pelaksanaan tugas keperawatan pelayanan umum dan
 - e. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Supervisor Kamar rawat.
3. **Kelompok Asisten Keperawatan**
Kelompok asisten keperawatan meliputi tugas, membantu, dan melaksanakan tugas dan tindakan sesuai dengan perintah dan kebijakan.

Struktur Organisasi Kesehatan Pokok Kabupaten Penorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Penorogo nomor 01 tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Peraturan Kabupaten Organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja kesehatan Kabupaten Penorogo sebagai berikut:

- a. **Dinas**
- b. **Perangkat kesehatan yang terdiri:**
 - 1) **Seksi kesehatan**
 - a. Sub bagian umum dan keperawatan
 - b. Sub bagian kegawatmukaan, pencegahan penyakit dan penanggulangan

- 2) Sekeloa Tata Pemerintahan
- 3) Sekeloa Pendidikan Masyarakat
- 4) Sekeloa Kekerabatan dan Kelembagaan ummah
- 5) Sekeloa Kecepatan Masyarakat
- 6) Sekeloa Penguatan Ummah
- 7) Kikompuk jebatana ummah

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pustaka Kipusatan Peronggo telah meluncurkan sebagai berikut:

Jumlah pegawai sebanyak 10 orang dengan rincian sebagai berikut:

Berikanlah Struktur Organisasi dan Staf

- **Dewan** : 1 Orang
- **Dewan** : 2 Orang
- **Wakil** : 6 Orang
- **Staf** : 7 Orang

Maximum Marks Allocation :

- S-3 : 10 marks
- S-2 : 10 marks
- S-1 : 10 marks
- Overall : 0 marks
- S.T.A : 10 marks
- S.T.P : 0 marks

Grading System :

- Group A : 10 marks
- Group B : 10 marks
- Group C : 10 marks
- Group D : 0 marks

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
Estructura Organizativa



1.2 PERMASALAHAN UTAMA

Pembinaan dalam membangun layanan penting dan sangat bermanfaat dalam proses penyediaan layanan pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi permasalahan yang tepat dan berhasil strategi meningkatkan akseptabilitas prima pembangunan, dapat dirombak dan secara mandiri serta nilai manfaat dapat bertanggung jawabkan dan menjawab kebutuhan nyata yang dihadapi oleh pembangunan.

Hal ini strategi berdasarkan tugas dan fungsi DPRD adalah untuk yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi DPRD dimana yang akan datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi strategi adalah keadaan yang apabila tidak ditanggapi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan sebaliknya, dalam hal tidak ditanggapi, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai uraian, isu strategi yang dihadapi Kecamatan Padak antara lain:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai kecamatan sehingga pelayanan publik tidak maksimal.
2. Sistem keolahannya termasuk SOP (Standar Operasional dan Prosedur) pelayanan kurang di kembangkan sehingga ada beberapa pelayanan kurang kurang maksimal.
3. Undang – undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa memulau kemampuan bagi Pemerintah desa untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat Kecamatan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten yang selama ini merupakan model standar daerah, tentunya tidak bisa lepas dari realisasi pelaksanaan UU Desa ini. Gagasannya, peltasan kecamatan bukan dalam secara mandiri. Peran Kecamatan masih perlu dipertahankan mengingat kualitas pemerintah desa yang beragam.
4. Telah keluarganya beberapa regulasi yang mengatur aspek kecamatan dalam hal-hal administrasi desa. Peraturan Pemerintah (PP) No.18 Tahun 2006 tentang administrasi pemerintahan desa.

1.4 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja (LAK) Kecamatan Padukuhan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 ini bertitik tolak sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dan ditambah Kelemb. Kelemb. dan Revisinya.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Rancangan dan Kerja Antara Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Peraturan Keluaran Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
6. Peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Pemerintahan dan RB Nomor 33 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Pelaksanaan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 – 2023.
9. Peraturan Daerah Ponorogo Nomor 22 Tahun 2017 tentang Peraturan Rencana Kerja Kecamatan Kecamatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2018.
10. Peraturan Daerah Ponorogo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo Tahun 2014.

1.5 Elemen-ta Laporan Kinerja

Sistem-ta Laporan Kinerja (LJK) Kementerian Publik Kabupaten Pangrapa Tahun 2026 ini disusun mengacu pada kerangka teoritis: *Kelemba Water 55 Tahun 2014 tentang Peraturan Teknik Per-jarjan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*, sebagai berikut:

5.01 Perencanaan

Pada sub-bab ini disajikan rencana kerja tahunan, rencana kerja an-ah tahunan, Rencana Kerja Utama Dinas Hukum dan Keadilan sebagai laporan kinerja.

5.02 Pelaksanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan penjelasan / artikel penyajian kinerja tahun yang bersangkutan.

5.03 Akuntabilitas Kinerja

5.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub-bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap penyajian kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap penyajian kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja satu capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan bobotnya tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja setiap dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya dengan realisasi (jika ada).
5. Analisis penyebab keterbelakangan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja satu elemen/aksi yang telah dilakukan.
6. Analisis aksi/obesin penggunaan sumber daya.
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keterbelakangan atau kegagalan pencapaian penyajian kinerja.

3.2 Revisi Anggaran

Pada sub bab ini diberikan revisi anggaran yang digunakan dan yang akan digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

3.2.1/1 Revisi

Pada bab ini diberikan simpulan untuk alat capaian kinerja organisasi serta bentuk di mana mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- b. Matrik Rencana
- c. Rencana Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- d. Rencana Kinerja Tahun 2025
- e. Pengukuran Kinerja Tahun 2025

BAB I PERENCANAAN KINERJA

2.1 TUJUAN DAN SASARAN KINERJA KECAMATAN PADUK

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada permasalahan yang ada dan ingin serta dibacavasi pada kurva dan analisis strategi. Berdasarkan Misi Kecamatan Paduk Tahun 2021-2025, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kecamatan Paduk, sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Bersih dan Akuntabel

Misal: Hubungan Antara Misi dan Tujuan:

Misi : Menegakkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Tanggung jawab, dan inovatif.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Paduk

Untuk mewujudkan tujuan ini sasaran yang hendak dicapai. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kecamatan Paduk Kabupaten Pangkep antara lain :

- Peningkatan kualitas Pelayanan
- Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada Masyarakat
- Pengembangan sarana dan prasarana

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu tindakan yang ditetapkan oleh lembaga Perencanaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk stabilisasi pedoman, pegerangan atau petunjuk dalam penyelenggaraan program/kegiatan guna mencapai ketertarikan dan ketertarikan dalam mewujudkan tujuan.

Di dalam menerapkan kebijakan ini dipergunakan oleh kondisi eksternal maupun internal organisasi, maka kebijakan tidak untuk masing-masing (karakteristik) berbeda-beda. Kebijakan ini lebih bersifat operasional dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan tertentu (dikawatir masing - masing program/kegiatan berbeda kebijakan sekiranya).

Kebijakan teknik ini merupakan kewenangan Camat yang telah tertanam di dalam untuk mengelola seperti Sumber Daya (baik SDM maupun Anggaran) yang dimiliki. Kebijakan ini juga merupakan strategi implementasi/operasional dari Camat untuk melaksanakan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Dalam semua kebijakan teknik yang diambil pada dasarnya untuk melaksanakan program dan kegiatan (proyek yang telah ditetapkan), sehingga kebijakan teknik untuk masing-masing karakteristik berbeda-beda. Langkah kebijakan yang dilakukan di Kecamatan Pucuk dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pada tingkat Meningkatkan Produktivitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat.

2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKJ)

Pencapaian kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dilakukan secara langsung dengan aparat penyusunan dan melibatkan anggota serta masyarakat kemudian bag ini akan untuk mengupayakan dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana upayanya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan tujuan operasional.

Adapun Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Publik adalah sebagai berikut.

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKJ) TAHUN 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di bidang Administrasi	Nila Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	95
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase desa yang tercapai skor IKM nya	100

2.3 PERJALAN KINERJA

Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Publik Tahun 2025 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2025 menjadi lampiran bagi Kecamatan Publik untuk mewujudkan kinerja subunit ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Publik Tahun 2025.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah ditandatangani oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan Menertibkan Perilaku
Moral Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Sempu Atas
Layanan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai
Harapan Kinerja Dasar Pusk, sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian
Kinerja Kecamatan Puduk Tahun 2025

KAM II AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu kewajiban untuk menjawab dan bertanggung jawab dalam atau pencapaian suatu kegiatan yang terencana mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi organisasi kepada pemangku jabatan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan mengenai organisasi.

Sebagai pengganti amatan, Kecamatan Padak melaksanakan kewajiban melalui penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Padak. Laporan tersebut disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perencanaan Anggaran Nasional tentang Rencana, Evaluasi, dan Tata Cara Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 yang sebelumnya telah terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015.

Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Padak disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Padak Tahun 2015 yang sebelumnya telah terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 - 2015.

5.1 CAPAIAN KINERJA OPERASIONAL

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat nilai Indikator Kinerja Standar dengan realisasinya. Setelah dilakukan pengukuran akan diketahui apakah ada selisih Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan analisis guna mendapatkan obyek yang tepat untuk peningkatan kinerja tersebut yang akan selanjutnya (*performance improvement*).

Apabila dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo maka pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kinerja pada awal tahun telah diketahui. Setelah Penerimaan dengan status online. Status online adalah status yang menunjukkan kinerja berdasarkan tingkat atau waktu.

Tabel 3.1
Metode Pengumpulan Capaian Kinerja

SKOR	RENTANSI CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
4	Lebih dari 84,33%	Dah
3	81% sampai 82%	Sangat Baik
2	78% sampai 79%	Cukup
1	Kurang dari 74%	Kurang

Capaian antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2025

Selanjutnya pada tabel 3.1.1 akan diuraikan untuk melihat kinerja Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo tahun 2025, secara umum target dan realisasi kinerja pada tahun 2025 dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Puduk Tahun 2025

Aspek Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori Data
1	2	3	4	5	6
Peningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	85	79,33	93,33	Berikut Peningkatan Rekamata Puduk
Peningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat dalam meningkatkan Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat di Kecamatan	Prosentase Desa yang terdistribusi dan DM-nya	100	100	100	Terdapat Peningkatan DM Rekamata Puduk

2. Menetapkan dan merevisi fungsi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun :

Letak dan dibenarkan oleh :

Analisis capaian kinerja : menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemenuhan

Ditulis oleh : Kepala Pemerintahan yang ada untuk perbaikan kinerja yang akan datang

2.1 Capaian Kinerja : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di

bidang administrasi kependudukan

2. Capaian Kinerja Sesuai Matriksnya Monev

Peningkatan Pelayanan dan Peningkatan

penyediaan Pelayanan Dasar

Capaian : Kinerja sesuai matriksnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan diukur dengan 1 indikator sebagai berikut yaitu tabel di bawah ini

Tabel

3.12

Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
Tahun-tahun dan beberapa tahun Terakhir

Aspek Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
				Tahun 2023	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Mis. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	88,88	97,04	95	91,23	98,03
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat dan Peningkatan Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan	Dasar yang meningkat SKMnya	88	90	90	90	100

Analisis data capaian indikator kinerja sesuai ini adalah sebagai berikut:

Indikator kinerja misal survey kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi

Tahun 2021 target realisasi misal survey kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan administrasi kependudukan sebesar 88% , realisasi 01,23% . Perencana capaiannya yaitu 90,00 % , dan data pengakuan capaian aspek kinerja tahun 2025 , Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo mencapai predikat terendah. Pada tahun 2021 target realisasi misal survey kepuasan masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi kependudukan sebesar 88% realisasi 91,23 % . Dan data pengakuan capaian aspek kinerja tahun 2025 , Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo mencapai predikat sangat terendah

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Terjalin 4 faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan faktor – faktor dalam perencanaan strategi . hal ini harus dilakuk agar kecermatan Pihak Kabupaten Pasuruan mampu menjadi tulang punggung implementasi strategi . Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi sukses pencapaian sasaran terdapat secara menyeluruh kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi kependudukan dapat dibentangkan secara terinci sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Sarana pelayanan adalah faktor penting untuk terciptanya suatu pelayanan yang baik, sarana dan prasarana yang memadai adalah segala prasyarat peralatan perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat atau pendukung dalam pelaksanaan pekerjaan. Fasilitas sarana dan prasarana di Kecamatan Padoh merupakan bekal pendukung dalam pelayanan.

2. Prilaku pelayanan

Yaitu keseluruhan sikap dan perilaku yang diberikan kepada masyarakat diluar dari sisi kecerdasan atau pelayanan. Kita ketahui bahwa salah satu pelayanan publik di Kecamatan Padoh secara umum adalah secara SPP dan SOP namun kualitasnya masih perlu peningkatan dari segi biaya yang sudah tidak lagi dibebankan oleh masyarakat.

3. Tingkat Pengetahuan dan kemampuan Pegawai

Kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik pada umumnya sangat baik dan beberapa faktor penilaian yaitu sikap pelayanan, manajemen pelayanan, disiplin dan tanggung jawab, serta kelirif dan kesempatan hasil survey kepuasan masyarakat cukup baik.

4. Dukungan dari setiap elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang paling berpengaruh terhadap pelayanan publik . pelayanan publik yang baik akan terciptakan dan memberikan layanan kepada masyarakat

Pemenuhan – pemenuhan yang didapat dalam pencapaian kinerja sesuai dengan meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian dalam penyempurnaan SOP dan EOP adalah sebagai berikut:
 - Penyelesaian: Pelaksanaan tugas yang belum dilakukan sebagai pelaksanaan serta kaliber jabatan akan. Jumlah dan jenis SOP yang perlu ditetapkan dan ditubuhkan.
 - Alasan: Ia belum adanya Formid yang telah terdapat SOP atau standar kerjanya merupakan dalam penyusunan EOP masing masing kegiatan/pekerjaan pokok.
 - 2. Dari hasil survey lapangan menyimpulkan pada Kecamatan Puduk masih terdapat unsur-unsur yang belum memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan antara lain keragaman lingkungan ini berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan publik.

Agar upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan identifikasi dan inventarisasi SOP serta proses penyusunan serta mengidentifikasi implementasi SOP yang telah ada. Proses pelaksanaan dapat dilakukan dengan penyederhanaan tahapan dan proses pelayanan dengan mendapatkan masukan dari pemakai layanan. Dengan demikian pemakai layanan akan dengan mudah Mendapatkan informasi mengenai apa yang harus dilakukan dalam memperoleh pelayanan dengan baik dan tahapan yang ada.
2. Mengidentifikasi semua prosedur pendukung pelayanan yang berlaku serta mendapatkan anggaran untuk membiayai atau melakukan pelayanan masyarakat dalam rangka program kegiatan Kecamatan Puduk. Selain itu juga diharapkan meningkatkan keterbacaan kerapatan dan keterlambatan lingkungan pelayanan sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi pemakai layanan.

Demikian data capaian kinerja kinerja tahunan ini uraian sebagai berikut. Tabel yang terdapat berikut yang ditunjukkan tabel di atas.

- a) Tata pemerintahan
- b) Pertumbuhan lapangan
- c) Kesejahteraan Masyarakat
- d) Kelembagaan masyarakat
- e) Pelayanan umum

Tahun 2025 target ekspor hasil komoditas yang ditargetkan sebesar 100% terdapat sebesar 100% persentase capaianya yaitu 100%, jika dibandingkan dengan target nilai nyata maka tingkat kemampuannya sebesar 100% dan rata-rata pertumbuhan capaian rata-rata tingkat sebesar tahun 2025. Kecepatan pokok ketepatan program mencapai produk sangat berhasil.

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja

Pengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja merupakan dasar penting dalam perencanaan strategi. Hal ini harus diteliti dari aspek kemampuan pada kebutuhan program mampu menjawab berbagai permasalahan lingkungan sehingga dapat faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja secara ringkasnya kondisi penyediaan: pemerintah dan pemerintah penyelenggaraan pemerintahan desa / kabupaten dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Sarana dan prasarana yang tersedia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mampu mempengaruhi / keterbatasan suatu kegiatan. Contohnya Fasilitas – fasilitas kantor dapat menunjang meluar paparan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintah kabupaten
- 2) Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu membantu dalam menyelesaikan tugas tertentu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi desa.
- 3) Adanya keterbatasan tingkat pemerintahan tingkat desa dan perangkat di desa – desa terhadap melaksana pemerintahan dan regulasi.

Pemantauan – pemantauan yang di lakukan dalam pencapaian kinerja sesuai standar meningkatkan kondisi penyelenggaraan pemerintah desa / kabupaten dapat sebagai berikut :

- 1) Undang – undang no 8 tahun 2014 tentang desa membuka kesempatan bagi pemerintah desa untuk memodifikasi kebutuhan masyarakatnya / pemerintah

sebagai bagian dari pemerintah kabupaten yang akan melaksanakan masalah ekonomi Daerah . artinya: tidak bisa lepas dari pelaksanaan UU Desa ini . sehingga, pelayanan Kecamatan tidak dapat secara mandiri. Peningkatan Kecamatan masih perlu dipertahankan mengingat kapasitas pemerintah desa yang terbatas .

2. Tidak terlepas bahwa regulasi yang mengatur peran kecamatan dalam tata kelola pemerintahan desa . Peraturan Pemerintah (PP) NO. 10 TAHUN 2008 tentang tata cara khusus menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan kecamatan sebagai tidak terpisahkan Undang-undang (UU) no 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah . sesuai diperkuat dengan regulasi lokal peran kecamatan secara terpadu . UU ini juga harus memperhatikan peran Camat secara optimal dalam pengabdian kepada desa .

sementara peran dalam peningkatan dan pengakuan biaya ketika diwujudkan PadiPP di tahun 2011 ada peningkatan tentang tugas pemerintahan dan pengakuan desa . namun peningkatan itu masih sangat spesifik karena hanya ditujukan memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa . tidak ada peningkatan lain tentang apa masalah fasilitas dan koordinasi karena dianggap sudah jelas .

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tugas dan kewajiban pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintahan desa melalui regulasi yang lebih baik
2. Meningkatkan akses administratif pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintah desa
3. Memberikan pelatihan teknis manajemen pelaksanaan UU desa sesuai Kecamatan secara sistematisnya kegiatan ini akan memfasilitasi kelompok dibarengi dengan pelatihan secara desa atau kegiatan pengabdian masyarakat peran Kecamatan masih perlu dipertahankan mengingat kapasitas desa yang terbatas

4. Teliti tingkat kemampuan regulasi yang dimiliki pemerintah
- Dalam tata kelola pemerintahan desa, Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008 tentang secara khusus menetapkan fungsi dan wewenang pemerintah kecamatan sebagai tindak lanjut dari undang-undang (UU) no. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah belum diungkap dengan regulasi tingkat pemerintahan secara langsung. UU desa juga hanya menyebutkan peran camat secara singkat dalam pengendalian pejabat desa, sementara peran disampingkan dan pengawasan hanya terlihat diuraikan pada PP 45 Tahun 2014, ada pengujian tentang tugas pemerintah di pengawasan desa namun pengujian itu masih kurang spesifik karena hanya disebutkan mendampingi dan mengkoordinasikan berbagai tugas dan tanggung jawab desa. Untuk itu pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mengatur koordinasi karena dianggap sudah jelas.

Adapun upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperjelas fungsi dan kewenangan pemerintah kecamatan dalam pendampingan pemerintahan desa melalui regulasi yang lebih rinci
2. Meningkatkan status aparatur bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan pendampingan pemerintahan desa
3. Meningkatkan pelatihan teknis keterampilan pemerintahan UU desa untuk Kecamatan secara merata, utamanya bagi aparatur desa menengah ke atas seperti dalam prasyarat pencarian cara desa atau bagaimana pengawasan pelaksanaan

Tabel 3.1.5

Membandingkan Realisasi kinerja tempo dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

No	Isi dari Strategi	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir Rencana Strategis (2025)	Tingkat Rancangan
1	2	3	4	5	6-45-108
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Terapan Kepuasan Masyarakat (DKM) Pelayanan Administrasi	92,25	100	92,25
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas dan Kemandirian dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa Yang Memiliki Struktur Organisasi Desa Membangun (DOM) nya	100	100	100

Tabel 3.14
Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar kabupaten

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2025	Standar Kabupaten	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Mis: Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	92,22	90,00	102,47%
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kualitas dan Komparabilitas dalam melaksanakan pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Pembinaan Desa Yang Mengikuti Standar Desa Membangun (KAM) nya	0,257	0,754	32,89%

TABEL 2.5

Analisis penyediaan keberlanjutan: Kegiatan dan pencapaian - prosedur KRW untuk alternatif SDA yang telah dilakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan Kegiatan	Sikap yang ditunjukkan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Administrasi	Waktu Survey Kepuasan Masyarakat di (GRI) Pelayanan Administrasi	95	92,25	96,25	Sangat Baik	Mengembangkan dan meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kebijakan dan Penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Presentase Desa Yang Memiliki Desa Indeks Desa Membangun (IDM) nya	100	100	100	Sangat Baik	Sejauhnya diketahui untuk menunjang pembangunan jalan Desa

<p>1. 姓名</p> <p>2. 性别</p> <p>3. 年龄</p> <p>4. 民族</p> <p>5. 籍贯</p> <p>6. 职业</p> <p>7. 学历</p> <p>8. 婚姻状况</p> <p>9. 健康状况</p> <p>10. 宗教信仰</p> <p>11. 兴趣爱好</p> <p>12. 特长</p> <p>13. 自我评价</p> <p>14. 其他</p>	<p>1. 姓名</p> <p>2. 性别</p> <p>3. 年龄</p> <p>4. 民族</p> <p>5. 籍贯</p> <p>6. 职业</p> <p>7. 学历</p> <p>8. 婚姻状况</p> <p>9. 健康状况</p> <p>10. 宗教信仰</p> <p>11. 兴趣爱好</p> <p>12. 特长</p> <p>13. 自我评价</p> <p>14. 其他</p>	<p>1. 姓名</p> <p>2. 性别</p> <p>3. 年龄</p> <p>4. 民族</p> <p>5. 籍贯</p> <p>6. 职业</p> <p>7. 学历</p> <p>8. 婚姻状况</p> <p>9. 健康状况</p> <p>10. 宗教信仰</p> <p>11. 兴趣爱好</p> <p>12. 特长</p> <p>13. 自我评价</p> <p>14. 其他</p>	<p>1. 姓名</p> <p>2. 性别</p> <p>3. 年龄</p> <p>4. 民族</p> <p>5. 籍贯</p> <p>6. 职业</p> <p>7. 学历</p> <p>8. 婚姻状况</p> <p>9. 健康状况</p> <p>10. 宗教信仰</p> <p>11. 兴趣爱好</p> <p>12. 特长</p> <p>13. 自我评价</p> <p>14. 其他</p>	<p>1. 姓名</p> <p>2. 性别</p> <p>3. 年龄</p> <p>4. 民族</p> <p>5. 籍贯</p> <p>6. 职业</p> <p>7. 学历</p> <p>8. 婚姻状况</p> <p>9. 健康状况</p> <p>10. 宗教信仰</p> <p>11. 兴趣爱好</p> <p>12. 特长</p> <p>13. 自我评价</p> <p>14. 其他</p>	<p>1. 姓名</p> <p>2. 性别</p> <p>3. 年龄</p> <p>4. 民族</p> <p>5. 籍贯</p> <p>6. 职业</p> <p>7. 学历</p> <p>8. 婚姻状况</p> <p>9. 健康状况</p> <p>10. 宗教信仰</p> <p>11. 兴趣爱好</p> <p>12. 特长</p> <p>13. 自我评价</p> <p>14. 其他</p>
--	--	--	--	--	--

3.2. REALISASI ANGGARAN

Perincian anggaran Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo seperti dijabarkan pada tabel di bawah ini.

Realisasi Belanja Kecamatan Puteh Tahun 2025

NO.	URAIAN	Belanja Tidak Langsung			Belanja Langsung		
		ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Biaya Pegawai	1.122.334.100,00	1.071.870.189,88	95,51			
2	Biaya Bahan-bahan Jasa				344.948.100,00	328.823.480,00	95,30
3	Biaya Modal				10.289.900,00	10.480.100,00	101,80
	Jumlah	1.122.334.100,00	1.071.870.189,88	95,51	344.948.100,00	328.823.480,00	95,30

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban belanjanya tercatat pelaksanaan Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo, total anggaran belanja tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.550.338.790,00. Anggaran sebesar 8,75% terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 1.124.766.709,88 dan belanja langsung Rp. 1.444.448.600,26. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja langsung dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SAPD, sebagai pelaksana dari kegiatan dan kegiatan yang timbul dalam dokumen pemerintahan.

Belanja anggaran belanja langsung dialokasikan untuk Kamud 1 program dan 5 (lima) kegiatan dengan rincian anggaran sebesar Rp. 328.823.480,00 atau dengan persentase anggaran sebesar 97,70 %.

Rincian Anggaran Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo tahun 2025 sebagai

Rp. 2.000.228.780,80 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat realisasi dan pengalangan anggaran untuk menunjang pelaksanaan program / kegiatan pembangunan, pemertanggungjawaban tugas – tugas pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo pada tahun anggaran 2025, realisasikan adalah dana total sebesar **Rp. 2.000.228.780,80** yang terdiri dari bebaya Tidal Lampung sebesar **Rp. 1.751.795.708,80** dan Derasi Lampung **Rp. 248.448.850,00** Sedangkan realisasi anggaran dalam halanya dengan upaya memajukan prioritas pembangunan Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo melalui pendanaan APBD Kecamatan Putek tahun anggaran 2025 dari anggaran sebesar **Rp. 2.000.228.780,80** terrealisasi sebesar **Rp. 1.286.240.408,00** atau **64,47 %**.
Lulus bebaya tidal Lampung dari anggaran **Rp. 1.751.795.708,00** terrealisasi sebesar **1.417.176.138,00** atau **81,17%**. Sedangkan untuk bebaya Lampung dari anggaran sebesar **Rp. 248.448.850,00** terrealisasi sebesar **Rp. 829.225.400,00** atau **33,38 %** Yang artinya terdapat penghematan sebesar **Rp. 137.410.034,00** Berdasarkan uraian diatas terdapat penurunan alokasi dana total dari tahun 2025 sebesar **Rp. 2.000.228.780,80** dan tahun 2025 yangjati **Rp. 2.883.228.708,00** yang berarti terjadi kenaikan anggaran karena adanya perubahan anggaran dari APBD Kabupaten Ponorogo

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo tahun 2025 ini merupakan Laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2025. Dengan kata lain Laporan Kinerja ini berbentuk untuk menyajikan data informasi yang dapat digunakan upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan diarahkan dari tingkat output dan target sasaran strategis.

Untuk garis besar terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo selama tahun 2025 menunjuk keanekaragaman untuk mewujudkan Laju dalam Rencana 2021-2025.

Capaian kinerja pada sasaran meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Pemerintahan sebesar 85,23% dengan anggaran anggaran sebesar 33,36% sehingga tercapai efisiensi sebesar 1,58%. Capaian Kinerja pada sasaran meningkatkan kontribusi penyempurnaan pemerintahan Desa / Kelurahan sebesar 100% dengan anggaran anggaran sebesar 35,8 %.

Dalam pelaksanaan pencapaian target Indikator Kinerja Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo juga dilakukan dengan adanya alokasi anggaran belanja langsung tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 2.883.104.700,00 jumlah terdapat lebih direalisasikan sebesar Rp.1.894.242.458,96 atau 65,71 % yang artinya terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 988.862.241,04 atau 34,29 %.

Keterbatasan capaian kinerja tahun 2025 akan terungkap faktor yang terencana maupun yang tidak terencana, oleh karenanya langkah yang konstruktif dan kontrol melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan pemantauan dimasa mendatang. Ketidangan yang ada selama tahun anggaran 2025 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang.

B. SARAN

Penyusunan kegiatan-kegiatan yang mengacu pada faktor kunci kinerja Kabupaten Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Diberikan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mendukung terlaksananya program kerja Kecamatan Puteh dengan pendanaan indikator kinerja.
2. Penguasaan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan mandirinya seiring dengan pola perencanaan program yang partisipatif dan pengendalian anggaran yang signifikan.
3. Mempertahankan sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo dalam rangka pencapaian target sasaran strategis guna mewujudkan Laju BKPD.
4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan... maka optimalisasi pemanfaatan dan mekanisme manajemen internal organisasi di Lingkungan Kecamatan Puteh Kabupaten Ponorogo desahnya di tingkatnya.

Ponorogo, 01 Desember 2020
Camat Puteh



Camat, Sri Muli
Puteh
Np. 198008199001001

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

2. The second part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

3. The third part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

4. The fourth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

5. The fifth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

6. The sixth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

7. The seventh part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

8. The eighth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

9. The ninth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

10. The tenth part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mr. C. D. Brown.

Date	Description	Debit	Credit
1998-01-01	Balance forward		100.00
1998-01-15	Cash on hand	50.00	
1998-01-20	Accounts payable		25.00
1998-02-01	Cash on hand	75.00	
1998-02-10	Accounts payable		30.00
1998-02-25	Cash on hand	100.00	
1998-03-01	Accounts payable		45.00
1998-03-15	Cash on hand	120.00	
1998-03-20	Accounts payable		60.00
1998-03-25	Cash on hand	150.00	
1998-03-31	Accounts payable		75.00
1998-04-01	Cash on hand	175.00	
1998-04-10	Accounts payable		90.00
1998-04-15	Cash on hand	200.00	
1998-04-20	Accounts payable		105.00
1998-04-25	Cash on hand	225.00	
1998-04-30	Accounts payable		120.00

100

STATE OF CALIFORNIA
COUNTY OF LOS ANGELES

PLAT NO. 100
SHEET NO. 100

THE STATE OF CALIFORNIA, COUNTY OF LOS ANGELES, BEING THE COUNTY IN WHICH THE LANDS DESCRIBED IN THIS PLAT ARE SITUATED, DO HEREBY CERTIFY THAT THE PLAT OF THE LANDS DESCRIBED IN THIS PLAT WAS FILED FOR RECORD IN THE OFFICE OF THE COUNTY CLERK OF SAID COUNTY ON THE _____ DAY OF _____, 19____.

SECTION	TOWNSHIP	RANGE	PLAT NO.	SHEET NO.	ACRES	FRAC.	OWNER	DATE
1	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
2	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
3	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
4	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
5	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
6	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
7	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
8	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
9	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
10	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
11	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
12	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
13	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
14	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
15	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
16	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
17	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
18	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
19	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
20	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
21	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
22	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
23	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
24	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
25	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
26	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
27	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
28	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
29	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
30	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
31	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
32	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
33	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
34	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
35	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
36	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
37	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
38	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
39	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
40	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
41	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
42	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
43	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
44	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
45	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
46	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
47	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
48	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
49	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
50	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
51	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
52	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
53	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
54	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
55	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
56	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
57	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
58	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
59	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
60	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
61	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
62	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
63	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
64	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
65	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
66	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
67	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
68	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
69	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
70	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
71	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
72	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
73	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
74	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
75	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
76	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
77	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
78	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
79	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
80	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
81	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
82	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
83	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
84	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
85	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
86	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
87	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
88	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
89	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
90	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
91	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
92	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
93	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
94	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
95	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
96	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
97	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
98	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
99	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100
100	10 N.	10 W.	100	100	100	100	100	100

100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

PERFORMANCE REPORT: MANUFACTURING PLANT, BIRMINGHAM, ALABAMA

Plant	Product	Department	Production					Total
			Units	Value	Cost	Profit	Margin	
Plant A	Product X	Dept. 1	100	1000	800	200	20%	
		Dept. 2	200	2000	1600	400	20%	
		Dept. 3	300	3000	2400	600	20%	
		Dept. 4	400	4000	3200	800	20%	
Total			1000	10000	8000	2000	20%	
Plant B	Product Y	Dept. 1	150	1500	1200	300	20%	
		Dept. 2	250	2500	2000	500	20%	
		Dept. 3	350	3500	2800	700	20%	
		Dept. 4	450	4500	3600	900	20%	
Total			1200	12000	9600	2400	20%	

TOTAL
 2200 Units
 22000 Value
 17600 Cost
 4400 Profit
 20% Margin



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN PUDAK

Jalan Raya Tulung Puduk Nomor 17 Puduk, Ponorogo, Jawa Timur 64412
Telp: 0351-879101, Faksimil: 0351-879101
Email: kecamatan.puduk@pnorogo.go.id

REVISI PERMAIARAN KINERJA TAHUN 2025

Demi tercapainya pelaksanaan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYADI, S.P., M.H.

Jabatan : Camat Puduk

Bersama dengan Kepala Pkwa Perantau:

Nama : KUSUMAPRATI, S.H.

Jabatan : K4 Wilayah Ponorogo

Bersama dengan Kepala Pkwa Perantau, Kabupaten dan Kota:

Pkwa Perantau tercapai dan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan arahan ini, dalam rangka mencapai target kinerja yang merupakan aspek yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Berhubungan dan begitulah seterusnya yang telah menjadi mandat tanggung jawab kami.

Pkwa Perantau akan melakukan kegiatan yang diperlukan untuk akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pencapaian ini dan menginformasikan yang diperlukan untuk rangka pemertan penghapusan dan

Puduk, 11 Desember 2024.

Wakil Kepala

Udianto

Kepala Perantau

Suryadi, S.P., M.H.
Camat
HP: 0822811800398

REVISI PERJUDIAN KIBERJA TAHUN 2019
KEDIRAHAN PUDAK KABUPATEN PONOROGO

NO.	ESKARIS KIBERJA	INDIKATOR KIBERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi	Tata Survei Kapuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi	80%
2	Meningkatkan tata kerja Pemerintah, khususnya bagi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan	Persentase Desa yang memiliki SKM nya	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pemerintahan Desa Kabupaten Wulu	Rp. 1.505.471.000,00	PAFED
2. Program Peningkatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 30.500.000,00	PAFED
3. Program Peningkatan Kualitas Desa dan Kelurahan	Rp. 0	PAFED
4. Program Peningkatan urusan Pemerintahan Umum	Rp. 0	PAFED
5. Program Pemukiman dan pengasutan Pemerintahan Desa	Rp. 30.000.000,00	PAFED
Jumlah	Rp. 1.835.971.000,00	PAFED

Pudak, 31 Desember 2020

Pihak Ketua



Ketua

Pihak Peserta



Kawit, S.H., M.H.
 Peserta
 NIP. 196008198010001

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja sebagai pedoman dan acuan dan program yang akan diimplementasikan dalam Rencana strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dan kelengkapan anggaran serta merupakan komitmen tugas bersama untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam Rencana Kerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Putek adalah sebagai berikut:

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021

NO.	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat di Bidang Administrasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi	95
2	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan, Kelembagaan dan Kinerja Aparatur dalam melaksanakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Persentase desa yang meraih skor IKM > 90	100

**LAPORAN KINERJA (LKJ)
SEKRETARIS KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2025**



**KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Pada akhir dari perjalanan belahad Nilai DNT serta dan
Bapak Irena dan keluarga, maka Laporan Kinerja (LK) Sekretari
Kecamatan Patak Tahun 2025 dapat diserahkan tepat waktu yang telah
dibuatkan. Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata
keperintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada Masyarakat publik
bahwa Sekretaris Kecamatan Patak mempunyai komitmen dan integritas yang kuat
untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang
berbasis data maupun outcome. Di era yang dinamis ini juga diaman untuk
memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan
yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam
Pembidayaan Masyarakat sebagai lembaga pertanggungjawaban kinerja. Sebagai
media akuntabilitas kinerja, maka laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas
dan efisiensi kinerja Sekretari Kecamatan melalui pelaksanaan program dan
kegiatan dengan membandingkan pada Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kinerja
dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Patak, 10 Desember 2025

Sekretaris Kecamatan



Muhammad Fauzan Fauzan, S.Pd, SE, MEd

Pejabat TK 1 (R/d)

Np. 188012252010011000

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	
DAFTAR ISI	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	
DAFTAR ISI	
A. Rencana Kerja	
B. Capaian Kinerja	
C. Strategi dan Analisis Finansial	
D. Rencana Kerja Lanjut	
E. Tanggapan Akademi Langgung	
DAFTAR ISI	
A. Nomenklatur	

DAFTAR TABEL

Total	2.1	Sebaran Indeks dan Tingkat ke-Pajak dan Pembiayaan Keuangan Wilayah Persebaran DPPKAD	2
Total	2.2	Statis Distribusi Pengeluaran Capaian Kinerja	2
Total	2.3	Capaian Kinerja ke-Pajak dan Pembiayaan Keuangan Bidang Persebaran DPPKAD	3
Total	2.4	Persebaran Kinerja dan Anggaran (Dokumen)	3
Total	2.5	Peta Anggaran dan Realisasi Sektor Lapangan TA. 2025	3

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Sebagai Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan strategi kecamatan, dan persiapan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja kecamatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Sekretariat;
 2. Pelaksanaan tugas pelayanan administratif;
 3. Pengaturan administratif kepegawaian di lingkungan kecamatan;
 4. Pengaturan administratif keuangan dan gaji pegawai;
 5. Pengaturan surat menyurat, kendorn, ketertarikan dan keputusahan;
 6. Pengaturan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
 7. Penyelenggaraan protokole, humas dan perjalanan dinas;
 8. Penyusunan data statistik dan persiapan;
 9. Pelaksanaan pelayanan umum di kecamatan; dan
 10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
-

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Selengkapnya yang telah ditetapkan Rinc. Perjanjian Kinerja Sekretaris Kecamatan Padak, tanggal 1 Oktober 2023 dengan sasaran, indikator kinerja dan target selengkapnya dijabarkan dalam tabel seperti berikut ini:

Tabel 2.1. Sasaran, Indikator dan Target, Sekretaris Kecamatan Padak

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kesejahteraan Masyarakat, Pelaksanaan dan Rampung Tanggapan Kecamatan	Persentase Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
		Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang Baik	100%
		Persentase pelaksanaan administrasi Pelaksanaan dan Kesejahteraan	100%
		Persentase Administrasi Urusan Perangai Daerah yang Baik dan Baik Sekali	100%
		Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%
		Persentase Badan Usaha Perseorangan Urusan Pemerintah Daerah yang tercapai	100%

B. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Sekretaris Kecamatan Nurali Tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sesuai dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan catatan Capaian kinerja. Untuk setiap catatan dukungan atas capaian yang terungkap dalam dokumen. Paparan Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk menentukan penilaian tingkat capaian kinerja setiap catatan, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	sesuai dengan 85 %	Baik
2	sesuai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 65 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sekretariat Kecamatan Padang Tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Sekretariat Kecamatan Padang

Materi Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Pergeseran Administrasi Umum dari Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Rumah Tangga Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%
	Persentase Daerah Pelaksanaan Dokumen Administrasi Keuangan yang akurat	100%	100%	100%
	Persentase Laporan dan administrasi Perencanaan dan Kepegawaian	100%	100%	100%
	Persentase Administrasi Umum Peringkat Daerah yang akurat tepat waktu	100%	100%	100%
	Persentase jasa pelayanan urusan Perumahan Daerah	100%	100%	100%
	Persentase layanan Kepegawaian	100%	100%	100%
	Persentase layanan Perumahan Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%

Table 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Customer)

Detail Program/Bagian	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Tujuan	Realisasi	Capaian (%)	Minim	Maksimal	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Jaminan dan Layanan Keperawatan Rumah Sakit Peningkatan dan Kualitas Layanan Rumah Sakit	Indikator Keperawatan Tingkat Kepuasan dan Kualitas Layanan Rumah Sakit	90%	100%	100%	0	0	
	Indikator Jumlah Sakit/riwayat Keperawatan yang Dilayani	90%	100%	100%	1.712.000,00	1.800.000,00	94,5%
	Indikator Keefektifan Keperawatan Rumah Sakit	90%	100%	100%	10.000,000	11.000,000	90,9%
	Indikator Keperawatan Keperawatan Rumah Sakit yang Dilayani yang Dilayani tepat waktu	90%	100%	100%	16.000,000	16.000,000	100%
	Indikator Jumlah Pasien yang Dilayani	90%	100%	100%	22.000,000	22.000,000	100%
	Indikator Keperawatan Rumah Sakit yang Dilayani yang Dilayani tepat waktu	90%	100%	100%	22.000,000	22.000,000	100%
	Indikator Keperawatan Rumah Sakit yang Dilayani yang Dilayani tepat waktu	90%	100%	100%	22.000,000	22.000,000	100%
	Indikator Keperawatan Rumah Sakit yang Dilayani yang Dilayani tepat waktu	90%	100%	100%	22.000,000	22.000,000	100%

Dari tabel tersebut dapat diuraikan pencapaian total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (2007 dan 2008/2009) Sekretariat Kecamatan Patak sebagai berikut.

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (dari per 2008/2009) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Kecamatan Patak sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 98,30%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sesuai yang akan diuraikan Sekretariat Kecamatan Patak pada Tahun 2020 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut.

1. Indikator Persentase pemecatan dan pengangkatan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % realisasi sebesar 100% sehingga capaiannya sebesar 100%.
 2. Indikator Persentase dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang dibuat target 100 % realisasi 100 % sehingga capaiannya sebesar 100%.
 3. Indikator Persentase ketuntasan dan ketepatan target target 100% realisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %.
 4. Indikator Persentase administrasi umum perangkat daerah tepat waktu dengan target 100% realisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %.
 5. Indikator Persentase jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% realisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %.
 6. Indikator Persentase sarana prasarana penunjang urusan Pemerintah Daerah yang layak target 100% realisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100 %.
-

Jadi, kesimpulan untuk evaluasi terhadap 6 (enam) indikator kinerja Sekretaris Kecamatan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Baik". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Sekretaris Kecamatan yang dibuktikan oleh Rinvu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Sekretaris Kecamatan Padi dibuktikan pada tiga aspek yang telah ditetapkan dalam DPPK kemudian dibandingkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat persentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Raga Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Program Pemungutan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	1.026.173.000,00	1.216.402.000,00	84,31%
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan dan Pelayanan Publik	82.821.400,00	21.478.100,00	25,93%
3.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	10.000.000,00	11.870.000,00	51,92%
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	122.890.300,00	122.100.040,00	99,42%
	JMLAH	2.032.884.700,00	1.362.240.000,00	66,48%

Dengan demikian hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target secara umum masuk dalam kategori "Sangat Baik", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diperjelas dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mencapai pelaksanaan kegiatan dan sasaran anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan peran serta masyarakat dalam pertanggung jawaban melalui melakukan pembinaan ke desa-desa secara optimal.

E. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKJ) Sekretaris Kecamatan Padar Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat mendeteksi suatu gambaran prestasi kerja secara detail, sedangkan metode ini praktis dan sistematis, sehingga hal ini dapat meningkatkan kerentannya dengan lupis. Sekretaris Kecamatan Padar prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Sekretaris Kecamatan di waktu yang lalu dan prestasi tersebut kerja di waktu yang akan datang.

Daftar Tanggapan (Dapat / Tidak Dapat)

Laporan kinerja baik

Laporan sudah baik

Laporan dipertahankan

Rendahnya nilai yang

Capaian nilai yang

Lain-lain _____

BAB II PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Satuan IV Sekretaria Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang tidak terpisahkan dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Sebagai pertanggungjawaban, maka Sekretaria Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo senantiasa memperbaiki program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mencapai perubahan dan strategi Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Sekretaria Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo telah Sangat Baik/di atas capaian kinerja sebesar 100% dan capaian realisasi anggaran sebesar 98,30%.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretaria Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk meningkatkan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Yang Patuh,
Camat



Sekeloa H.M/I
Pondok / 01/21
Np. 196806001990031910

Puduk, 31 Desember 2021
Sekretaria Kecamatan Puduk

Muhammad Andes Yuana, S.Pd, ST, MEd
Pondok TK 1 / 01/21
Np. 196709121990031010

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUBAG KEUANGAN PENYUSUNAN
PROGRAM DAN PELAPORAN
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2025



KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

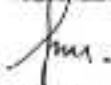
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sudah Laporan Kinerja (LKJ) Subbag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Keuangan Publik Tahun 2024 dapat diterbitkan tepat waktu yang akan diterbitkan. Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk menunjukkan cara pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada Masyarakat publik bahwa Subbag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Keuangan Publik berupaya konsisten dan tekun yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berwujud output maupun outcomes. Di sisi yang lain laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Subbag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan menghasilkan pada Rencana Kerja Tahunan, Pelaporan Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Publik, 21 Desember 2024

Subbag Keuangan Penyusunan Program
Pelaporan Keuangan Publik



Salsabilla
Ferdia Mulya (S.S)
NIP. 197407202007011015

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tipe-Peak dan Fungsi Jabatan	
BAB II WILAYAH KERJA KADIPATI JAWA TIMUR	
A. Peranan Kinerja	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Kinerja Kinerja	
D. Kinerja Kinerja Lintas	
E. Tanggapan Akademi Lingsung	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Subag Kecamatan Perijanaan Program dan Penerimaan meliputi pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan dan pelaksanaan laporan keuangan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Subag Keuangan, Perijanaan Program dan Penerimaan, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan laporan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- c. Penyusunan Laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- d. Penyusun laporan koordinasi penyusunan rencana kerja Kecamatan;
- e. Pengelolaan data perencanaan anggaran Kecamatan;
- f. Penyusun laporan laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan, dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

B. Pelempaan Kinerja

Selanjutnya yang akan ditanyakan Revisi Pelempaan Kinerja Subbag Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan Keuangan Publik, tanggal 1 Oktober 2022 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Subbag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di lingkungan Direktorat	Jumlah dokumen PDB yang dibuat	2 dokumen
		Jumlah dokumen DPA yang dibuat	2 dokumen
		Jumlah dokumen RPD yang dibuat	2 Dokumen
		Jumlah dokumen POKK dan RPD POKK yang dibuat total untuk	2 dokumen
		Jumlah dokumen LUJ yang dibuat	1 dokumen
		Jumlah dokumen penyusunan dasar pembentuk regulasi dan penetapan pengalihan keuangan	4 dokumen
		Jumlah dokumen Surat Permisian Penyaliran (SPF) yang dibuat	100 dokumen
		Jumlah dokumen Surat Permisian Membayar (SPM) yang dibuat	100 dokumen
		Jumlah dokumen GUK Berencana Pengeluaran	100 dokumen
		Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban	00 dokumen

C. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Selang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaksanaan Kecamatan Pucuk Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara dan dibukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran. Capaian kinerja untuk setiap sasaran diukur sebagaimana yang tertuang dalam Indikator Pelejaran Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk menentukan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran. Menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut

Tabel 2.2 Basis Odnal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	70 % sampai dengan 85 %	Baik
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Tabel 2.3

Capaian Kinerja dalam Keuangan, Perencanaan, Program dan Pelaporan Kemandirian Pusat

Subsistem Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pengeluaran Administrasi Keuangan penyusunan Program dan Pelaporan di Lingkungan Kementerian	Jumlah dokumen SKK yang dibuat	1 dokumen	2 dokumen	200%
	Jumlah dokumen DPM yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen RENCANA yang dibuat	1 dokumen	2 dokumen	200%
	Jumlah dokumen FAKTA dan RENCANA yang dibuat sesuai waktu	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Jumlah dokumen LU yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Jumlah dokumen pelaksanaan laporan pertanggungjawaban	4 dokumen	4 dokumen	100%
	Jumlah dokumen Surat Perintah Pembelian (SP) yang dibuat	18 dokumen	120 dokumen	667%
	Jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat	10 dokumen	120 dokumen	1200%
	Jumlah dokumen SP/ Surat Perintah	14 dokumen	120 dokumen	857%

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Document)

Kategori Kegiatan / Program	Indikator Kinerja	Mula			Akhir		
		Tipe	Sasaran	LOKUP (%)	Tipe	Realisasi	LOKUP (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Kecamatan	Jumlah dokumen SKD yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Jumlah dokumen DPA yang dibuat	2 dokumen	2 dokumen	100			
	Jumlah dokumen RENCANA yang dibuat	2 Dokumen	2 Dokumen	100			
	Jumlah dokumen Perencanaan RENCANA yang dibuat	3 dokumen	3 dokumen	100			
	Jumlah dokumen LRU yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	100			
	Jumlah dokumen anggaran tahun kepengantarannya dan pelaksanaan	4 dokumen	4 dokumen	100			
	Jumlah dokumen Surat Perintah Pembelian (SP) yang dibuat	02 dokumen	02 dokumen	100			
	Jumlah dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) yang dibuat	02 dokumen	02 dokumen	100			
	Jumlah dokumen SPK Pembelian	02 dokumen	02 dokumen	100			
	Jumlah dokumen SPK Pembayaran	02 dokumen	02 dokumen	100			

Berdasarkan perhitungan total skor nilai pencapaian kinerja dan anggaran (0001.00Y.00007005) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan sebesar 100% dan capaian anggaran sebesar 100%. Hal ini merupakan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

D. **Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Sektor yang akan ditinjau Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaksanaan pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sesuai dengan memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator jumlah dokumen laporan kinerja RKA yang dibuat dengan target 2 dokumen terrealisasi 2 dokumen sehingga capainya sebesar 100%
2. Indikator jumlah dokumen DPA yang dibuat dengan target 2 dokumen terrealisasi 2 dokumen sehingga capainya 100%
3. Indikator jumlah dokumen jumlah revisi yang dibuat dengan target 2 dokumen terrealisasi 2 dokumen sehingga capainya 100%
4. Indikator jumlah dokumen Perlemb dan Revisi Perlemb yang dibuat tepat waktu dengan target 2 dokumen terrealisasi 2 dokumen sehingga capainya 100%
5. Indikator jumlah dokumen LKJ yang dibuat dengan target 1 dokumen terrealisasi 1 dokumen sehingga capainya 100%
6. Indikator jumlah dokumen laporan pertanggung jawaban alat bahan keuangan dengan target 4 dokumen terrealisasi 4 dokumen sehingga capainya sebesar 100%
7. Indikator jumlah dokumen surat Permisian Pembelian (SPR) yang dibuat dengan target 120 dokumen terrealisasi 120 dokumen sehingga capainya sebesar 100%
8. Indikator jumlah dokumen Surat Permisian Membayar (SPM) dengan target 120 dokumen terrealisasi 120 dokumen sehingga capainya sebesar 100%

6. Indikator jumlah dokumen di bawah Pengawasan dengan target 120 dokumen (realisasi) 120 dokumen sehingga capaian sebesar 100%.

Jadi kesimpulan untuk indikator tersebut 1 (satu) sesuai dan 6 (enam) indikator kinerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaksana dengan pemenuhan capaian kinerja sebesar 100% masuk kepada kategori "Sangat Baik". Hal ini bisa dicapai dan terkumpul Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaksana sehingga capaian Renc. Kerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaksana, penghitungan diuraikan pada page anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA kemudian melakukan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentasi capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Rupa Anggaran dan Realisasi Kinerja Lelang TA 2025

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Penyakit Administratif Pembelian			
	Penyediaan Administrasi Pelayanan Tegal ASD	11.875.000,00	11.875.000,00	100%
2.	Peningkatan Pegembangan Lirih Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	
	Penyusunan Rancangan Talis DPO	0	0	
JUMLAH		11.875.000,00	11.875.000,00	100%

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sesuai masuk dalam kategori "Sangat Baik", tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diperbaiki dan ditingkatkan.

E. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya pemeliharaan administratif yang diharapkan dirancang dan dilaksanakan dalam rangka memperoleh pelaksanaan program anggaran dan pencapaian sasaran kerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa.

F. Tanggapan Absen Langsung

Tanggapan absen langsung dalam Laporan Kerja (LK) Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Padak-Katipaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara umum, walaupun metode ini praktis dan berorientasi pada, sehingga hal ini dapat menyajikan ketidakefektifan dengan lupa Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Padak. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Subag Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan di waktu yang lalu dan prestasi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Daftar Tenggapan (Dipercaya) Newer Lampung

Laporan umum bulat

Laporan umum bulat

Laporan khusus

Revisi laporan umum

Laporan umum umum

Laporan *Keuangan yang sudah baik,
perlu diteliti.*

BAB III PENUTUP

G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Tahun IV Subang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAPO di lingkungan Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai anggota kelompok dan akan dimah, maka Subang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo senantiasa mengaktifkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengaktifkan perubahan ke arah yang Pemerintahan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Subang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo telah Sangat Baik hasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 0%.

Laporan Kinerja (LK) Subang Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengabstribal
Dinas

Satrio S.H., M.H.
Pembina (S/II)
NIP. 19630501-1980011118

Ponorogo, 31 Desember 2025
Subang Keuangan, Penyusunan
Program dan Pelaporan
Kecamatan Puduk

Satrio S. Sin
Pemula Muda (R/II)
NIP. 197402082007011118

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasian Urutan pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaksana (Bendahara) Kecamatan Padak Katuparan Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang terkait atas Capaian Kinerja dan mewujudkan akuntabilitas serta berkeadilan untuk upaya perbaikan terus menerus dan keberlanjutan untuk penyajian kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai pemajuan dan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

Pengadministrasian Urutan Sub Bagian Keuangan - Penyusunan Program dan Pelaksana (Bendahara) Kecamatan Padak memiliki tugas, Maksud dan Tujuan, Penerimaan, Pengeluaran dan Pembelian terkait masalah Keuangan.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengadministrasian umum pada Sub Bagian Keuangan Penyusunan Program dan Pelaksanaan (Bansubwa) Kecamatan Padak sebagai mana terdapat dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan	Jumlah laporan RKA yang dibuat	2 laporan
		Jumlah laporan DPA yang dibuat	2 laporan
		Jumlah laporan Surat Permisian Pembukaan GPP yang diajukan	12 laporan
		Jumlah laporan Surat Permisian Membayar (SPM) yang diajukan	12 laporan
		Jumlah laporan SPJ Berdahak Pengeluaran	12 laporan
		Jumlah laporan laporan pertanggung jawaban	70 laporan
		Jumlah dokumen penyusutan laporan pertanggung jawaban sub jabatan yang diterbitkan	4 dokumen
		Jumlah surat lamaran keuangan Penyusunan Program dan Pelaksanaan	61 surat

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengawasan internal pada Sub Bagan Keuangan Penyusunan Program dan Pelaporan (Bendahari) KecamatanPadak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tersebut dan dituliskan dengan cara-cara yang mendukung dengan sasaran.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Data Administrasi Keuangan	Jumlah laporan RKA yang dibuat	2 laporan	2 laporan	100
		Jumlah laporan DPA yang dibuat	2 laporan	2 laporan	100
		Jumlah laporan Surat Permintaan Penyalangan DPA yang dibuat	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah laporan Surat Permintaan Mutasi	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah laporan RPI	100 laporan	100 laporan	100
		Berkas-bers Rengasur	10 laporan	10 laporan	100
		Jumlah laporan surat pemberitahuan pajak	10 laporan	10 laporan	100
		Jumlah dokumen permohonan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan anggaran Keuangan	4 dokumen	4 dokumen	100
		Jumlah surat perintah Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan	00 surat	00 surat	100

C. TANGGAPAN ATAS BEN LARSON

Tujuan saya
yang telah tercapai

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2025**



**KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LKj) Subang Umum dan Kepegawaian Kecamatan Purba Tahun 2020 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja (LKj) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada Masyarakat publik tentang Subang Umum dan Kepegawaian Kecamatan Purba mengenai komitmen dan aktual yang kuat untuk melaksanakan semua program yang berorientasi pada hasil yang mampu output menjadi outcome. Tujuan yang telah disusun ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja secara pemerintahan yang terdapat dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Subang Umum dan Kepegawaian melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan pada Rencana Kerja Tahunan, Program Kerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Purba, 31 Desember 2020

Subang Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Purba



Sumartono S. Sidi

Penata Madat (i/a)

NIP. 197311112008011013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tujuan Pokok dan Ruang Lingkup	
BAB II ANALISIS DASAR KEHUTANAN	
A. Pengertian Kehutanan	
B. Ciri-ciri Kehutanan	
C. Bidang dan Waktu Kehutanan	
D. Rencana Teknik Lahan	
E. Tanggapan Masyarakat Lingkungan	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Dasar, Indikator dan Target Kaki Pajak dan Pembinaan Keuangan Bintang Perikanan OPNAC	2
Tabel	2.2	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja	2
Tabel	2.3	Dasar, Indikator Kaki Pajak dan Pembinaan Keuangan Bintang Perikanan OPNAC	3
Tabel	2.4	Pemetaan Risiko dan Anggaran (Cost and Outcome)	3
Tabel	2.5	Peta Anggaran dan Rencana Belajar langsung TA 2022	3

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2018 tentang Kelakuan, Saesari Organisasi, Unitas Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Subag Urutan dan Kapopawakan mempunyai tugas melaksanakan dan perbaikan administrasi umum, kawat tangga dan kapopawakan.

Dalam melaksanakan tugas, Subag Urutan dan Kapopawakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan dan perbaikan administrasi umum dan keorganisasian di lingkungan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan urusan surat tangga dan surat kawat;
- c. Penyusunan rencana, anggaran dan presentasi pertanggung kawat;
- d. Penyelenggaraan inventarisasi keorganisasian kawat di lingkungan Kecamatan;
- e. Penyelenggaraan prosedur, surat, dan perjalanan surat;
- f. Pengelolaan administrasi dan perbaikan kapopawakan di lingkungan Kecamatan;
- g. Perbaikan gaji pegawai Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pelaksanaan tugas dan;
- i. Pelaksanaan tugas kawat lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

**DAFTAR
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Subbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pundak, tanggal 10 November 2020 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Subbag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jaminan Administrasi Umum Murnah Tanpa dan Kecepatan	Jumlah Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai	10 dokumen
		Jumlah dokumen perencanaan pekerjaan dinas	1 dokumen
		Jumlah Dokumen tentang Inisiatif dan Ases	2 dokumen
		Jumlah Dokumen tentang Kebijakan Pegawai	3 dokumen
		Jumlah Dokumen about Kesehatan Diri Bekerja	5 dokumen
		Jumlah surat keluar dan masuk yang di Pindai	1000 surat
		Jumlah surat tentang umum dan kepegawaian	50 surat
		Jumlah surat kate yang diterbitkan	50 surat
		Jumlah dokumen kebijakan standar dan prosedur	5 dokumen
		Jumlah dokumen perjanjian dan akreditasi	10 dokumen
		Jumlah dokumen perjanjian kerja di dan dalam	10 dokumen
		Jumlah dokumen perjanjian kerja modal dan umum	10 dokumen
		Jumlah dokumen perjanjian kerja dan Unsurq ASN	20 dokumen
		Jumlah Persema dan Kabupaten	10 dokumen
		Jumlah dokumen perjanjian kerja dan operasi/pendirian dinas yang di Pindai	2 Milyar 4 Milyar

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Subag Urutan dan Kepegawaian Kecamatan Pundak Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan diukur dengan skala data yang membandingkan dengan standar. Capaian kinerja untuk setiap sasaran diukur sebagaimana yang diatur dalam dokumen RENCANA PEJAJARAN KINERJA dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Skala Orisinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 95 %	Sangat Baik
3	75 % sampai dengan 95 %	Baik
2	65 % sampai dengan 75 %	Cukup
1	Kurang dari 65 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Subag Ururi dan Kepegawaian Kecamatan Kecamatan Padak sebagai berikut.

Tabel 2.3

Capaian Kinerja Subag Ururi dan Kepegawaian Kecamatan Padak

Bidang Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Mempertahankan pengelolaan Administrasi Umum Murni dan Terpadu dari Kepegawaian	Jumlah Dokumen Persetujuan Kerja Pegawai	13 dokumen	13 dokumen	100
	Jumlah dokumen permohonan surat izin	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah Dokumen tentang Permohonan Jabatan	2 dokumen	2 dokumen	100
	Jumlah Dokumen untuk Kerusakan Perangkat	2 dokumen	2 dokumen	100
	Jumlah Dokumen untuk Penilaian Diri Pegawai	2 dokumen	2 dokumen	100
	Jumlah surat undangan masuk yang di kirim	100 surat	100 surat	100
	Jumlah surat tentang Ururi dan Kepegawaian	50 surat	50 surat	100
	Jumlah surat tugas yang dikirimkan	50 surat	50 surat	100
	Jumlah dokumen perbaikan sarana dan prasarana	0 dokumen	0 dokumen	100
	Jumlah dokumen pelayanan masyarakat	14 dokumen	14 dokumen	100
	Jumlah dokumen pembangunan fisik air dan limbah	12 dokumen	12 dokumen	100
	Jumlah dokumen pemeliharaan sarana makan dan rumah	12 dokumen	11 dokumen	92
	Jumlah dokumen pembangunan gas dan lingkungan hidup	20 dokumen	20 dokumen	100
	Jumlah Pemetaan dan Ketersediaan	11 dokumen	11 dokumen	100
	Jumlah dokumen kerentanan banjir dan bencana alam lainnya yang berespon	2 Mei 4 Mei	3 Mei 4 Mei	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sektor Program/Regenerasi	Indikator Kinerja	2023			2024		
		Target	Capaian	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
Strategis Peningkatan Administrasi Murni Mulus Tanggap dan Kapasitas	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Regenerasi	10 dokumen	10 dokumen	100	-	-	-
	Jumlah dokumen perantara sebelum proses	1 dokumen	1 dokumen	100	-	-	-
	Jumlah Dokumen dalam Proses dan Akad	2 dokumen	2 dokumen	100	-	-	-
	Jumlah Dokumen Uraian Kinerja Peningkat	3 dokumen	2 dokumen	75	-	-	-
	Jumlah Dokumen Uraian Kinerja Capaian	4 dokumen	4 dokumen	100	-	-	-
	Jumlah aset tetap dan modal yang dikelola	900 aset	807 aset	107	2.285.000	2.044.000	100
	Jumlah aset kelolaan umum dan kapasitas	50 aset	39 aset	115	-	-	-
	Jumlah aset tetap yang dikelola	10 aset	8 aset	80	-	-	-
	Jumlah dokumen kebijakan teknis dan prosedur	5 dokumen	5 dokumen	100	11.120.000	11.110.000	99
	Jumlah dokumen prosedur, SOP, dan SOP	14 dokumen	14 dokumen	100	-	-	-
	Jumlah dokumen perencanaan teknis, arsitektural, dan sipil	12 dokumen	12 dokumen	100	8.495.000	8.055.540	11
	Jumlah dokumen perencanaan teknis, arsitektural, dan sipil	12 dokumen	11 dokumen	92	88.200.000	80.175.000	91
	Jumlah dokumen perencanaan sipil dan lingkungan RDB	25 dokumen	25 dokumen	100	1.040.000.000	1.011.200.000	10,71
	Jumlah Kinerja, Aka, dan Kinerja	14 dokumen	14 dokumen	100	14.874.000	14.880.000	99
	Jumlah dokumen kependidikan dan kependidikan lainnya yang dikelola	2.000 dokumen	2.000 dokumen	100	88.800.000	87.300.000	98,41

Berikan penilaian total aktual pencapaian kerja dan
tingkat *per outcome* di atas maka dapat dirapikan bahwa capaian
kerja Subag Litum dan Kategorisasi Kinerja adalah sebagai berikut:

dari capaian kinerja anggaran sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa tercapai efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Subbag (Unit) dan Kepegawaian pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan terdiri 15 (lima belas) indikator kinerja dengan metrik sebagai berikut

1. Indikator Jumlah kinerja/pengujian dengan target 15 dokumen
Realisasi sejumlah 15 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator Jumlah dokumen pemenuhan paksa/inspeksi dengan target 1 dokumen
Realisasi 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator dokumen inventaris dan aset dengan target 1 dokumen
Realisasi 1 dokumen, sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator jumlah jasa/tenaga ahli/tenaga pengasah dengan target 3 orang
Realisasi 3 orang sehingga capaian 100%.
5. Indikator Jumlah Jumlah dokumen surat keputusan tagg jawab dengan target 8 orang
Realisasi 8 orang, sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator Jumlah surat keluar dan masuk yang di kirim dengan target 1000 surat
Realisasi 1007 surat, sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator Jumlah surat keluar urusan kepegawaian dengan target 50 dokumen
Realisasi 58 dokumen, sehingga capaiannya sebesar 116%.
8. Indikator jumlah Jumlah surat tugas yang diterbitkan dengan target 10 dokumen
Realisasi 9 dokumen, sehingga capaiannya 90%.
9. Indikator jumlah dokumen catatan rekrutasi dan mutasi dengan target 8 dokumen
Realisasi 8 dokumen, sehingga capaiannya 100%.
10. Indikator jumlah dokumen pemenuhan jabatan dengan target 14
Dokumen realisasi 14 dokumen sehingga capaiannya 100%.
11. Indikator jumlah dokumen persetujuan baik, ar dan lamar dengan target 12
Dokumen realisasi 12 dokumen sehingga capaiannya 100%.
12. Indikator jumlah dokumen pemenuhan surat masuk dan keluar dengan target 12
Dokumen realisasi 11 dokumen sehingga capaiannya 92%.
13. Indikator jumlah dokumen persetujuan gaji dan tunjangan ASN dengan target 14
Dokumen realisasi 14 dokumen, sehingga capaiannya 100%.
14. Indikator jumlah dokumen pemenuhan kesehatan dengan target 14
Dokumen realisasi 14 dokumen sehingga capaiannya 100%.
15. Indikator jumlah dokumen verifikasi data / pemenuhan verifikasi data yang terdapat
Dengan target 2 modul di motor realisasi 2 modul di motor sehingga capaiannya 100%.

Pelaksanaan pemeliharaan sarana/sarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan Tim Swasta	22.000.000	22.400.000	90,2
Jumlah	1.520.970.000	1.524.000.000	99,8

Berdasarkan hasil analisis dan analisis kinerja menunjukkan bahwa motivasi tingkat menengah masuk dalam kategori "Dengan Efektif", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan dan ditingkatkan.

E. Perencanaan Tidak Jangka Panjang

Perencanaan tidak jangka dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka mencapai penyelesaian sebagai organisasi dan pencapaian visi-misi kinerja. Perencanaan

Salah satu metode yaitu menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur di tingkat Kecamatan.

F. Tanggapan Akseon Langsung

Tanggapan akseon langsung dalam Laporan Kinerja (LK) Subag Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Kabupaten Pasirang menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara umum, walaupun metode ini sudah terstandardisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keterbatasannya dengan tugas Subag Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Puduk. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi dari prestasi kerja Subag Urusan dan Kepegawaian di waktu yang lalu dan prediksi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Daftar Jawaban (Jawab) Papan Lemping

Lapisan tumpang tindih

Lapisan switch back

Lapisan diperbaiki

Masalah tidak selesai

Operasi tidak selesai

Lapisan kawat yang tidak baik, perlu diperbaiki.

BAB III PENUTUP

H. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Eselon IV Subag Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan laporan yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai pengantar keanggotaan awal Daerah, maka Subag Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo senantiasa melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat menjadi acuan dalam hal evaluasi Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Subag Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Baik/Berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100%, dan capaian target anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LK) Subag Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengetahui
Cepat

Pamela (Nia)
Np.19680507190001010

Pada 21 Desember 2025
Subag Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Puduk

Gubernur
Pamela Mada (Nia)
Np.19721112009011010

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasian Urusan pada Sub Bagian Urusan dan Kegiatan Keumatan Pustak Kabupaten Ponorogo disusun untuk memberikan informasi yang akurat atas Capaian Kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta berkeadilan untuk upaya perbaikan terus menerus kekinisitasnya untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai penunjang dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan kepada pihak-pihak publik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Pengadministrasian Urusan pada Sub Bagian Urusan dan Kegiatan Keumatan menjadi tugas. Melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian bahan dan dokumen urusan.

BAB 8 AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJAJAN KINERJA

Petajanan Kinerja Pengadministrasian Urutan pada Sub Bagian Urutan dan Kepegawaian KecamatanPadak sebagai mana terdapat dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat di sikan pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Mengoptimalisasi kinerja pengadministrasian Urutan Kecamatan Kecamatan Padak	Jumlah laporan Petajanan Kinerja Pegawai	12 laporan
		Jumlah laporan penilaian jabatan PNS	1 laporan
		Jumlah laporan hasil pengamatan dan hasil	4 laporan
		Jumlah laporan hasil Kunjungan Pengawat	3 laporan
		Jumlah laporan hasil Kunjungan Di Bawah	8 laporan
		Jumlah surat keluar dan masuk yang di Hapus	1000 surat
		Jumlah surat tertinggal surat dan kepegawaian	0 surat
		Jumlah surat tugas yang diterbitkan	0 surat
		Jumlah laporan perbaikan sarana dan prasarana	8 laporan
		Jumlah laporan penilaian jasa kearsifan	10 laporan
		Jumlah laporan pemeliharaan gedung dan sarana	12 laporan
		Jumlah laporan penilaian hasil pengamatan dan hasil	12 laporan
		Jumlah laporan kunjungan dan pengamatan di Kecamatan Padak	20 laporan
		Jumlah laporan hasil monitoring kegiatan, bentuk team dan lain lain	20 laporan
		Jumlah laporan kegiatan dan pembinaan terhadap dinas yang bawahan	12 laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasian Urutan pada Sub Bagian Urutan dan Kepegawaian KecamatanPadak dilakukan dengan cara membandingkan antara

target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sumber:

no	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan pengakuan Akreditasi Lunak Jumlah Tenaga dan Kecepatan	Jumlah asuhan Periodik Keperawatan	11 asuhan	11 asuhan	11 asuhan	100
	Jumlah asuhan perantara perawatan	1 asuhan	1 asuhan	1 asuhan	100
	Jumlah asuhan Edukasi Perilaku dan Ases	4 asuhan	4 asuhan	4 asuhan	100
	Jumlah asuhan Edukasi Perilaku Keperawatan	1 asuhan	1 asuhan	1 asuhan	100
	Jumlah asuhan Edukasi Perilaku bagi Keluarga	4 asuhan	4 asuhan	4 asuhan	100
	Jumlah surat surat dan hasil studi kasus	100 surat	100 surat	100 surat	100
	Jumlah surat lembar Lunak dan Keperawatan	33 surat	33 surat	33 surat	100
	Jumlah surat laporan studi kasus	11 surat	11 surat	11 surat	100
	Jumlah laporan artikel ilmiah dan prosiding	4 asuhan	4 asuhan	4 asuhan	100
	Jumlah asuhan, presentasi dan seminar	11 asuhan	11 asuhan	11 asuhan	100
	Jumlah asuhan pelayanan publik dan kepuasan	12 asuhan	12 asuhan	12 asuhan	100
	Jumlah laporan penelitian bidang masing-masing rumah	12 asuhan	11 asuhan	11 asuhan	92
	Jumlah asuhan pelayanan publik dan keluarga ASN	24 asuhan	24 asuhan	24 asuhan	100
	Jumlah laporan studi ilmiah kefarmasian, farmasi dan kesehatan lainnya	20 laporan	20 laporan	20 laporan	100
	Jumlah asuhan kefarmasian dan farmasi kesehatan dan kefarmasian lainnya	12 asuhan	12 asuhan	12 asuhan	100

6. Tambahkan atau Lengkapi
Tugaskannya dengan
yang tidak ada.

BAB III PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Pergadmirstrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudek Kabupaten Ponorogo sebagai wujud pertanggungjawaban atas kerja dari Pergadmirstrasi Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pudek.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja tahun 2023 sesuai indikator kinerja capaian kimianya dengan indikator baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Arah NKD Ponorogo Daerah dan penyusunan Perbuk Perencanaan Kemandirian Ponorogo Daerah agar dapat terlaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 31 Desember 2023

Mengalahui,
Kepala Umum dan Kepegawaian
Kecamatan Pudek



Deni S.S
Pangkat MUDA (1/A/0)
NIP. 1971111120080110018

Perwakilan Kepala Sistem dan Teknologi
Informasi
Kecamatan Pudek



Titus Rifnu Sofana S.S
Pangkat MUDA (1/A/0)
NIP. 199608042002020001

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Peralihan ke Unit pada Sub Bagian Urus dan Kegiatan Keasahan/Publik Masyarakat Perorangan disusun untuk memberikan informasi yang akurat atas Capaian Kerjanya dan mewujudkan akuntabilitas serta berlandaskan untuk upaya perbaikan terus menerus berdasarkan data yang diperoleh secara riil. Selain itu juga berfungsi sebagai penjabaran dan pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan target - publik yang diuraikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2023.

Peralihan ke Unit pada Sub Bagian Urus dan Kegiatan memiliki tugas : Melakukan kegiatan koordinasi dan pendokumentasian bahan dan dokumen umum.

0 4 0 8
AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJUMUAN KINERJA

Paparan Kinerja Regenerasi dan Urus pada Sub Bagian Urus dan Kepegawaian Kecamatan Padak sebagaimana terdapat dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

NO	DASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Surat Perintah yang diproses dan diterbitkan	80 Surat
		Jumlah Surat Keluar yang diproses dan diterbitkan	300 Surat
		Jumlah Dokumen Perilaku Kerja Pegawai	10 Dokumen Pegawai
		Jumlah Dokumen Laporan Kerja Pegawai dan Hasil	4 Dokumen Pegawai dan Hasil
		Jumlah Kinerja Surat tentang Urus dan Kepegawaian	10 Kinerja dan Kepegawaian
		Jumlah surat keputusan awal jabatan/keputusan tentang awal yang berlaku	10 Dokumen dan Kepegawaian
		Jumlah surat tentang urus dan kepegawaian	8 Surat

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Pengadministrasian Urutan pada Sub Bagian Urutan dan Keperawatan Kesehatan/Pulak dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data data yang mendukung dengan asmen.

No	Isaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Administrasi Keperawatan	Jumlah Surat Masuk yang diproses dan ditubuhkan	100 Surat	100 Surat	100
		Jumlah Surat Masuk yang diproses dan ditubuhkan	100 Surat	100 Surat	100
		Jumlah Dokumen Fikshan Klinik Pogram	6 Dokumen	6 Dokumen	100
		Jumlah Dokumen Labral Klinik Internal dan Asat	4 Dokumen	4 Dokumen	100
		Jumlah Kotasi Surat lnting Urutan dan Keperawatan	33 Kotasi	33 Kotasi	100
		Jumlah laporan tindakan dan tindakan tindakan yang dilakukan	11 Dokumen	11 Dokumen	100
		Jumlah surat lnting urut dan keperawatan	18 Surat	18 Surat	100

6. JANGKAAN STABIL LAMPIRAN

Empire State Building

yang telah runtuh.

DAB B
PERUTUH

D. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Pengadministrasian Urusan pada Sub Bagian Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Padang Kecamatan Padang Kabupaten Pangkep sebagai acuan pertanggungjawaban atas Kinerja dari Pengadministrasian Urusan pada Sub Bagian Urusan dan Kepegawaian Kecamatan Padang.

Berdasarkan hasil penyusunan pemantauan realisasi kinerja tahun 2025 sesuai indikator kinerja capaian kerjanya dengan kriteria baik (100%)

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Aspek ASK Perangkat Daerah dan penyusunan Perkap Perangkat Kecamatan Perangkat Daerah agar dapat melaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengucapkan,
Kepada Kepala Urusan dan Kepegawaian
Kecamatan Padang



Siran S. Sari
Pencat Mada (R/S)
Np 19731112006011010

Padang, 31 Desember 2025

Pencat Kerja Sistem dan
Teknologi Informasi



M. Alfariz Sofro S. Kom
Pencat Mada (R/S)
Np 19900901202502001



**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2025**



**KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Pada akhir dari perjalanan berabad-abad Negeri DNT selama dua setengah abad dan terulangnya maka Laporan Kinerja (LK) Sekel-Tata Pemerintahan Kecamatan Padang, Giatu-Tata Pemerintahan Kecamatan Padang Tahun 2021 dapat dilaksanakan tepat waktu yang telah dibantu Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada masyarakat publik bahwa Sekel-Tata Pemerintahan Kecamatan Padang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang menjadi output maupun outcome. Di sisi yang lain laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Sekel-Tata Pemerintahan melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan pada Rencana Kerja Tahunan, Kebijakan Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Padang, 31 Desember 2020

Kel. Tata Pemerintahan
Kecamatan Padang

Ben Sud Samsu, S.H.
Pemada Mada

Np. 12030420200019804

Ts.1888/1

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
DAFTAR ISI	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Akutansi	
DAFTAR ISI	
A. Perilaku Kerja	
B. Capaian Kinerja	
C. Budaya dan Analisis Finansial	
D. Rencana Tindakan Lanjut	
E. Tanggapan Akutansi Langsung	
DAFTAR ISI	
A. Nomenklatur	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Ketoran, Indikator dan Target Kadu Pajak dan Pembiayaan Keuangan Borang Persepatan (DPPKAD)	2
Tabel	2.2	Revisi Denda Pajak dan Capaian Kinerja	2
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Kadu Pajak dan Pembiayaan Keuangan Borang Persepatan (DPPKAD)	3
Tabel	2.4	Pemetaan Kinerja dan Anggaran (CDA) dan G30000	4
Tabel	2.5	Pajak Anggaran dan Realisasi Revisi Lempang TA 2022	5

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2018 tentang Keputusan, Struktur Organisasi, Urutan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Sekeloa Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan untuk pemerintahan Desa / Kelurahan serta meningkatkan kependudukan dan pertanahan/agropasar.

Dalam melaksanakan tugas, Sekeloa Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyajikan bahan dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/dahulu/kelurahan;
2. Menyajikan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan di bidang administrasi desa dan / atau kelurahan;
3. Menyajikan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan, pembina, petunjuk dan pengawasan pemilihan kepala desa;
4. Menyajikan bahan koordinasi dan fasilitasi penyajian pencatatan, pengungkutan dan pendaftaran hasil laporan desa dan lingkungan desa lainnya;
5. Menyajikan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan bidang pertanahan/agropasar;
6. Pengumpulan data dalam rangka administrasi pelaksanaan koordinasi;
7. Menyajikan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Pelaksanaan pelaksanaan tugas di bidang tata pemerintahan; dan
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

SAS II
AKUNTABILITAS KERJA JABATAN

B. Pelejaan Kerja

Selengkapnya yang telah dibagikan Pelejaan Kerja Kas Tata Pemerintahan Kecamatan Putek, tanggal 1 Oktober 2025 dengan sasaran, Indikator Kerja dan target selengkapnya dijabarkan dalam tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kas Tata Pemerintahan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
C.	Peningkatnya koordinasi antar pelaksanaan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Pemerintahan Desa/wali Administrasi, Akadustifikasi dan perantara / Agensi	Jumlah dokumen Pedoman Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dibuat	6 dokumen
		Jumlah dokumen Program Kerja Desa yang dibuat dan selesai.	8 dokumen
		Jumlah dokumen administrasi penyelenggaraan KCD	200 dokumen
		Jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring pelaksanaan KCD	12 kegiatan
		Jumlah laporan akhir kegiatan T&K Kecamatan	5 laporan
		Jumlah dokumen Pedua Akut yang dibuat	6 dokumen

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pudeh Tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan dibantu dengan data-data yang mendukung dengan catatan. Capaian kinerja untuk setiap tahun diukur sebagaimana yang tertera dalam dokumen Rencana Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana berikut

2.2 berikut:

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	71 % sampai dengan 85 %	Baik
2	55 % sampai dengan 71 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja saat Taha Pemerintahan Kecamatan Puduk Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Saat Taha Pemerintahan Kecamatan Puduk

No. Urut	Isi Urut	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang dibuat	10 dokumen	10 dokumen	100
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Program Kerja Desa yang dibuat saat ini	1 dokumen	1 dokumen	100
3	Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran APBD	201 dokumen	201 dokumen	100
4	Kelembagaan	Jumlah kegiatan kelembagaan dan monitoring pelaksanaan ADE	12 kegiatan	12 kegiatan	100
5	Kelembagaan	Jumlah konsep surat tentang tata pemerintahan	6i konsep	6i konsep	100
6	Kelembagaan	Jumlah dokumen Proke Hutan yang dibuat	1 dokumen	1 dokumen	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Jumlah Output/ Output	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas pelayanan administrasi pemerintahan Pemerintahan umum / Pemerintahan Desa / Kelurahan serta Administrasi Kependudukan dan Perketuhan / Registrasi	Jumlah dokumen Perbaikan Data dan Perubahan Klasek Data yang masuk	80 dokumen	80 dokumen	100	2.000.000	2.000.000	100
	Jumlah dokumen Program Kerja Desa yang disusun setiap tahun	4 dokumen	4 dokumen	100	4.000.000	4.000.000	100
	Jumlah dokumen perencanaan anggaran ingginal 2023	20 dokumen	20 dokumen	100			
	Jumlah laporan pertanggung jawaban dan monitoring pelaksanaan PDD	12 laporan	12 laporan	100			
	Jumlah KIR yang sudah tertuang Tata Pemerintahan	30 konsep	30 konsep	100			
Jumlah dokumen Peta Desa yang dibuat	8 dokumen	8 dokumen	100				

Nilai total tersebut dapat diukur persentase total terhadap pencapaian kinerja dan anggaran (COST PER OUTCOME) Kas Desa Pemerintahan sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan total jumlah pencapaian kinerja dan anggaran (000/ Rp 0000000) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kas Tua Pemerintahan Kecamatan Padak Pondasi sebesar 100 % dan capaian anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kas Tua Pemerintahan pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) sasaran dengan terdiri 4 (empat) indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut:

1. Indikator jumlah desa yang mempunyai dokumen perencanaan Pembangunan desa secara tepat waktu dan sesuai peraturan perundang undangan dengan target 6 Desa realisasi sejumlah 6 Desa sehingga capainya 100%.
2. Indikator jumlah dokumen proyek hukum desa yang terwujud dengan target 42 dokumen realisasi 42 dokumen sehingga capainya sebesar 100%.
3. Indikator jumlah desa yang melaksanakan kerja administrasi pelayanan (SPU) dengan target 6 desa realisasi 6 desa sehingga capainya 100%.
4. Indikator jumlah dokumen aporny diperdulikan dengan target 6 dokumen terwujud 4 dokumen sehingga capainya sebesar 100%.

Dari berdasarkan untuk evaluasi terhadap 4 (empat) indikator kinerja Kas Tua Pemerintahan dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai kepada konsep "Sempit Bertani". Hal ini bisa sebagai dan komitmen Kas Tua Pemerintahan diwujudkan dalam Nota Patungas Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kas Tua Pemerintahan, penghitungin dibekalkan pada pagu anggaran yang telah dibrokan di dalam DFPN kemudian dan kerangka dengan realisasi belanja terpuang tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No	Program	Anggaran		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Kelembagaan penyusunan peraturan daerah dan peraturan Walikota (Perda)			0%
2.	Kelembagaan pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerimaan Asli Daerah	15.000.000	15.000.000	100%
Jumlah		15.000.000	15.000.000	100%

Sebaran hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target secara umum dalam kategori "Target Berhasil", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan dan ditingkatkan.

C. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka menanggapi pelaksanaan rencana anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di Desa.

D. Tanggapan Akademi Langsung

Tanggapan akademi langsung dalam Laporan Kinerja (LKJ) Kasri Tata Pemerintahan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini memiliki beberapa kelemahan, sehingga hal ini dapat meningkatkan ketidaktepatannya dengan upaya Kasri Tata Pemerintahan Kecamatan Purbalingga. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasri Tata Pemerintahan di waktu yang satu dan prestasi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Daftar Pustaka (Daftar) Aliran Lempeng

Lempeng lempeng bali

Lempeng bali bali

Lempeng bali bali

Lempeng bali bali

Lempeng bali bali

Lempeng bali bali yang sudah bali
atau digunakan

BAB II PENUTUP

P. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Eselon IV Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo merupakan kegiatan yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPRD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai pejabat keuangan dan aset daerah, maka Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo senantiasa melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengaitkan perubahan ke strategi Pemerintah Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo telah sangat berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian kerapian anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LK) Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Putek Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempatkan dukungan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Menghormati
Demai



Sukris S.H.M.H
Pembantu T/P/As
Np 158600341942021010

Ponorogo, 31 Desember 2025

Kasi Tata Pemerintahan
Kecamatan Putek



Evi Bud Satrias, SH
Pembantu Muda T/P/As I
(P/S)
Np 158600341942021001

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Pengadministrasian Urusan pada Sekeloa Pendidikan Masyarakat (Pengelola Pendidikan Masyarakat) Kecamatan/Putak dibuat untuk memberikan informasi yang terdapat atau Capaian Kinerja serta menunjukkan akuntabilitas serta berisikan untuk upaya perbaikan terus menerus dan bertanggung jawab untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban atau apa yang sudah dilaksanakan kepada setiap pejabat publik yang ditunjukkan dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.

Pengadministrasian Urusan pada Sekeloa Pendidikan Masyarakat (Pengelola Pendidikan Masyarakat) Kecamatan/Putak Kecamatan Ponorejo memiliki tugas : Melakukan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Masyarakat.

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
----	-----------------	-------------------	--------	-----------	-------------

A. PERJULUHAN KINERJA

Perjuluhan Kinerja Penguat Internal Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersebitnya Data dan Statistik Tahun Pemerintahan Data	Jumlah laporan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang terbit	10 laporan
		Jumlah laporan Peraturan Kepala Desa yang tidak terbit	1 laporan
		Jumlah laporan pemantauan pelaksanaan anggaran APBD	100 laporan
		Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	10 laporan
		Jumlah surat lindung Tawar Pemerintahan	10 laporan
		Jumlah Laporan Prosidur Hukum yang dibuat	1 Laporan

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Penguat Internal Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan sasaran.

1	2	3	4	5	6
1	Terdapat Administrasi Pemerintahan Desa	Terdapat laporan Pembuat Desa dan Pembuat Kepala Desa yang terakumulasi	18 laporan	18 laporan	100
		Jumlah laporan Program Kerja Desa yang tidak sesuai waktu	4 laporan	4 laporan	100
		Jumlah laporan rekomendasi penyelesaian program ADD	200 laporan	200 laporan	100
		Jumlah laporan pembinaan dan monitoring pelaksanaan ADD	12 laporan	12 laporan	100
		Jumlah surat keberang Talas Pemerintahan	30 laporan	30 laporan	100
		Jumlah Laporan Perak Pabrik yang terakumulasi	7 Laporan	7 Laporan	100

BAB II

PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan kinerja (LKJ) Pengadministrasian Pemerintahan pada Sistem Tata Pemerintahan Kecamatan Putak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan Pengadministrasian Pemerintahan pada Sistem Tata Pemerintahan Kecamatan Putak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian realisasi kinerja tahun 2025 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu sangat meningkatkan koordinasi dalam penyusunan perencanaan Anjak NDR Peringkat Daerah dan penyusunan Perkuat Peningkatan Keterampilan Peringkat Daerah agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui
Kepala Tata Pemerintahan



Beni Budi Santoso, SH
Pemeran Muda Tk I (R/1)
Np 19030620000411204

Putak, 31 Desember 2025
Perintah Kadaster



Kiki Prayitna
Pemeran Muda (R/1)
Np 19030620000411000

**LAPORAN KINERJA (LKJ)
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2025**

**KECAMATAN PUDAK
KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Pada akhir dari perjalanan perjalanan Akademi DIT bersama atau lembaga nirlaba dan kerabatnya maka Laporan Kinerja (LKJ) Sekeloa Perencanaan Masyarakat Kecamatan Puteh Tahun 2025 dapat diselesaikan laporan yang telah berakhir. Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah (SAKLP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada Masyarakat publik bahwa Kasi Perencanaan Masyarakat Kecamatan Puteh mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang tercapai sesuai dengan rencana. Di saat yang lain laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keterhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Sekeloa Perencanaan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Perencanaan Masyarakat melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mandatarinya pada Rencana Kerja Tahunan, Peta Jalan Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Puteh, 31 Desember 2025
Kasi Perencanaan Masyarakat
Kecamatan Puteh



Feryil S. Soe
Paralel Tingkat I (III/II)
Np. 1506020410921000

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
DAFTAR ISI	
DAFTAR I PENDAHULUAN	
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Jabatan	
DAFTAR II MULTIBELITING KEBERUSAHAAN	
A. Pekerjaan Kinerja	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja	
D. Rencana Kerja Lanjut	
E. Tanggapan Atasan Langsung	
DAFTAR III PENUTUP	
A. Kaitannya	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Salinan, Indikasi dan Target Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Kecang Persepsi DPP/UMI	3
Tabel	2.2	Struktur dan Fungsi Kasi Pajak Keras	3
Tabel	2.3	Salinan Kasi Kasi Pajak dan Perimbangan Keuangan Persepsi DPP/UMI	3
Tabel	2.4	Persepsi Keras dan Anggaran Kasi dan Kasi	3
Tabel	2.5	Pajak Anggaran dan Persepsi Kasi Lungsung TA 2005	3

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Solo Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan karantina dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengembangan, produksi serta pemasaran masyarakat dalam pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Solo Pemberdayaan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan bahan dalam rangka pembinaan pengembangan, produksi serta pemasaran masyarakat desa dan / atau kecamatan;
2. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang pertanian dan peternakan rakyat;
3. Penyusunan bahan koordinasi pemeliharaan tanaman dan ternak umum;
4. Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan produksi dan pengolah ruyang rias perkebun;
5. Penyusunan bahan karantina dan pelaksanaan pembinaan produksi dan distribusi hasil produksi;
6. Penyusunan bahan, masyarakat pemukiman pengembangan tingkat kecamatan;
7. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
8. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengkajian dan pengabdian masyarakat lingkungan;
9. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemberdayaan masyarakat; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**DAFTAR
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN**

B. Pelembagaan Kinerja

Sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 10/2015 tanggal 10 November 2015 dengan sebutan, indikator kinerja dan target sebagaimana terdapat dalam tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Hasil Tindakan Pemerintahan

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pembinaan perekonomian, peningkatan prestasi serta peran serta masyarakat dalam membangun	Jumlah dokumen perjanjian PKK	4 dokumen
		Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan	8 dokumen
		Jumlah dokumen Pelaksanaan PKK tingkat Kecamatan	12 dokumen
		Jumlah dokumen pelaksanaan penyuluhan program Desa Desa	8 dokumen
		Jumlah dokumen kegiatan kegiatan KURDHO	8 dokumen
		Jumlah dokumen Pengawasan Pasar Desa	4 dokumen
		Jumlah dokumen kegiatan kegiatan Desa Desa	8 dokumen
		Jumlah dokumen kegiatan kegiatan Desa Desa	4 dokumen
		Jumlah kegiatan tentang Pembinaan Masyarakat	12 kegiatan
		Jumlah surat perintah tentang pembinaan masyarakat	12 surat

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasri Pembudidayaan Masyarakat Kecamatan Puteh Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target, dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan dibalut dengan data data yang mendukung dengan sumber. Capaian kinerja untuk setiap sasaran diambil sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Renc. Peperjan Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	70 % sampai dengan 85 %	Baik
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Alasan capaian kinerja Kasi Perencanaan Masyarakat Kecamatan
 Patak Tahun 2025 sebagai berikut

**Tabel 2.5 Capaian Kinerja Kasi Perencanaan Masyarakat
 Kecamatan Patak**

Batasan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas dan Indeks Desa Pemberdayaan Masyarakat (IDM) desa serta peran serta masyarakat dalam pembangunan	Jumlah dokumen kerangka PMA	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen Rencana ROK Enggal Kecamatan	12 dokumen	12 dokumen	100
	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Desa Desa	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen rencana kegiatan BUKEDD	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen Perencanaan Aksi Desa	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen rencana kegiatan Desa Wisata	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah kegiatan terbagi Perencanaan Masyarakat	12 kegiatan	12 kegiatan	100
	Jumlah wisayaland terbagi Perencanaan	12 wisayaland	12 wisayaland	100

Dari hasil tersebut dapat diuraikan prosentase total anggaran pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcome) Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Padak. Halapuan Petaraji sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan total anggaran pencapaian kinerja dan anggaran (cost per outcome) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Padak. Peningkatan sebesar 100% dan capaian serapan anggaran sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

D. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Dasar yang akan dipakai Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2020 sejumlah 1 (satu) elemen dengan memiliki 10 (Sepuluh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator Jumlah dokumen pembinaan PKK dengan target 8 dokumen terlaksana sejumlah 8 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
2. Indikator Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan dengan target 8 dokumen terlaksana 8 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %
3. Indikator Jumlah dokumen Pelaksanaan PNI tingkat Kecamatan target 12 dokumen terlaksana 12 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
4. Indikator Jumlah dokumen rekomendasi penyusunan anggaran Desa/Desa dengan target 6 dokumen terlaksana 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
5. Indikator Jumlah dokumen mengikuti kegiatan BIMCEF dengan target 8 dokumen terlaksana 8 dokumen sehingga capaiannya 100%
6. Indikator Jumlah dokumen Pelaksanaan Ases Desa target target 6 dokumen terlaksana 6 dokumen sehingga capaiannya 100%
7. Indikator Jumlah dokumen mengikuti Kegiatan Inovasi Desa dengan target 8 dokumen terlaksana 8 dokumen sehingga capaiannya 100%
8. Indikator Jumlah dokumen mengikuti kegiatan Desa Wisata dengan target 1 dokumen terlaksana 1 dokumen sehingga capaiannya 100%
9. Indikator Jumlah kegiatan lintas Pemberdayaan Masyarakat dengan target 12 kegiatan terlaksana 12 kegiatan sehingga capaiannya 100%
10. Indikator Jumlah dokumen konsep lintas pemberdayaan masyarakat dengan target 6 konsep terlaksana 6 konsep sehingga capaiannya 100%

ada kemampuan untuk mencapai tercapai 93 (persentase) indikator Kinerja
Kategori Peningkatan Masyarakat dengan asumsi capaian Kinerja sebesar
100% masuk kepada kategori "Sangat Baik". Hal ini tidak terlepas dari
kemampuan Kategori Peningkatan Masyarakat dibangun dalam Renc. Perjanjian
Kerjasama.

Berkaitan dengan realisasi anggaran Kinerja Peningkatan Masyarakat
dibaca pada page anggaran yang akan ditetapi dalam DPPA kemudian
ditentukan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka
dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai
berikut.

Tabel 2.5 Page Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No.	Program	Anggaran		%
		Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	
1.	Peningkatan masyarakat Desa dan Kelurahan			
	a. Penyelenggaraan	0	0	0
	b. Penyelenggaraan	0	0	0
	c. Fasilitas ADD dan Dana Desa	0	0	0
	d. Penyelenggaraan Tahun Kerja Golong Roving (3SRM)	0	0	0
2.	Peningkatan dan Pengawasan pemerintahan Desa			
	Fasilitas penyusunan pencapaian pembangunan perdesa	17.512.000	17.511.000	99,99
	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Peningkatan Masyarakat Desa	86.279.022	85.643.140	99,3
	Jumlah	103.791.022	103.294.540	98,99

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa risiko tetap secara umum dalam kategori "Sangat Baik", tetapi ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diperjelas dan ditingkatkan.

E. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dengan rangka mempercepat pelaksanaan kegiatan dan mencapai anggaran serta pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut akan meningkatkan pengendalian di setiap sumber daya (baik SGM maupun anggaran).

F. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LK) Realisasi Penerimaan Masyarakat Kecamatan Pudu Kabupaten Paseroga menguraikan masalah pemetaan checklist. Masalah checklist dapat memberikan

untuk menjamin prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hasil ini dapat menunjukkan keterbacaannya dengan laporan Kasi Peningkatan Masyarakat. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atau prestasi kerja Kasi Peningkatan Masyarakat di waktu yang lalu dan prestasi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan Berwujud Awan Lempung

Lapisan teratas leleh

Lapisan tidak leleh

Lapisan terendah

Perataan teratas

Lapisan tidak leleh

Lapisan teratas yang sudah leleh
juga ditunjukkan

BAB III PENUTUP

G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Estorik IV Kasi Pembudayaan Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Sebagai pengantar keanggotaan awal Daerah, maka Kasi Pembudayaan Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo senantiasa merupakan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat menjadi pedoman bagi anggota Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pembudayaan Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo dinilai Sangat Baik dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian erapan anggaran sebesar 100%.

Laporan Kinerja (LK) Kasi Pembudayaan Masyarakat Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengantaha,
Gubernur



Soedibyo, M.H.
Pondok Kelapa
No. 1929050281990011013

Puduk, 31 Desember 2024
Kasi Pembudayaan Masyarakat
Kecamatan Puduk

Parro S.Soi
Pondok Kelapa (Bila)
No. 1929020419900211002

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Pada akhir dari perjalanan terhadap Nilai DNT serta atas bimbingan ilmiah dan kontribusinya maka Laporan Kinerja (LKJ) Setra Kementerian dan Kedeputian Umum Kementerian PUPK, Golek Tata Pemerintahan Kecamatan Puteh Tahun 2023 dapat diterbitkan tepat waktu yang akan diterbitkan Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada Masyarakat publik bahwa Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Puteh, merupakan komitmen dan tekad yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang menjadi output maupun outcome. Di sisi yang lain laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di bidang Tata Pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Kasi Pemerintahan dan Kedeputian Umum melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan mendeskripsikan pada Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Puteh, 31 Desember 2023

Kasi Pemerintahan dan Kedeputian Umum
Kecamatan Puteh

Heryng Ardianno, S.P.
Pemula (E/C)
No. 18011007200012100

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan	
BAB II KUALIFIKASI KEGURU JABATAN	
A. Raporan Kinerja	
B. Capaian Kinerja	
C. Evaluasi dan Wawancara Kinerja	
D. Akreditasi Kinerja Jabatan	
E. Tanggapan Akademi Lapangan	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Beberapa Indikator dan Target Nilai Pajak dan Pembangunan Keuangan Kecang Perencanaan DPPKAD	1
Tabel	2.2	Statis Indeks Pengukuran Capaian Kinerja	2
Tabel	2.3	Capaian Kinerja Nilai Pajak dan Pembangunan Keuangan Kecang Perencanaan DPPKAD	3
Tabel	2.4	Perubahan Kinerja dan Anggaran (Dok. dan Dokumen)	3
Tabel	2.5	Peta Anggaran dan Realisasi Secara Lengkapnya TA. 2022	3

EAB I PENDAHULUAN

C. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2018, Seksi Koordinasi dan Keterlibatan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan kegiatan bangsa, perlintasan dan keterlibatan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Koordinasi dan Keterlibatan Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan bangsa, perlintasan dan keterlibatan masyarakat;
2. Pengawasan serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan dan realisasi yang menyangkut koordinasi dan keterlibatan umum;
3. Penyajian bahan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi lain (Pali dan TN) serta pemuka agama mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan keterlibatan umum;
4. Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam rangka kerja perijinan;
5. Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kegiatan bangsa;
6. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
7. Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan;
8. Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dengan SKPD dan Instansi lain yang berkompeteri dalam bidang pemerintahan dan pengaplikasian peraturan perundang-undangan;
9. Pelaksanaan kontrol wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban;

12. Penyajian bahan konstruksi dalam rangka pemenuhan, status dan serta kecukupan dan penguatan suatu perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan bencana untuk penanganan gangguan informasi dan ketertarikan masyarakat.
11. Pelaksanaan pengamatan lanta dan rumah di Desa Cerat.
12. Pelaksanaan pelaksanaan lanta di bidang ketertarikan dan ketertarikan umum.
13. Pelaksanaan ketertarikan secara vertikal dengan Status Pabrik Peningkat Pupa Kabupaten dan
14. Pelaksanaan lanta lanta lain yang diberikan oleh Cerat

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Rona, Perjanjian Kinerja Kasi Kolaborasi dan Keterlibatan Utama Kecamatan Pudek, tanggal 20 Oktober 2020 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana disajikan dalam tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Kolaborasi dan Keterlibatan Utama

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi dalam melaksanakan pertemuan koordinasi dengan perlintasan dan kabupaten masyarakat serta pengabdian dalam rangka kerja jejaring	Jumlah dokumen penyusunan laporan penempatan kasus pengujian terdapat	1 Dokumen
		Jumlah penyajian bahan koordinasi SIPD dengan instansi lain (Tali dan TMI) serta pemuda	4 kegiatan
		Jumlah kegiatan monitoring pembangunan kewilayahan	8 kegiatan
		Jumlah Dokumen Peringatan HUKT Di	8 dokumen
		Jumlah peningkatan fasilitas penjangkauan Pemilu	8 Desa
		Jumlah koreksi sumbu tentang Kolaborasi dan Keterlibatan	10 koreksi Urusan
		Jumlah SPPT yang diterima dan ditanggarkan	8 Desa

B. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Ketahanan dan Ketertarikan Umum Kecamatan Padak Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data data yang mendukung dengan sesuai. Capaian kinerja untuk setiap sasaran dijabarkan sebagaimana yang tertera dalam dokumen Rambu-rambu Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan gambaran tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Peringkat Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	70 % sampai dengan 85 %	Baik
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kadu Kabupaten dan Kabupaten Uluwatu Kabupaten
Rural Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kadu Kabupaten dan Kabupaten Uluwatu
Kabupaten Pedesaan

Batasan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatkan koordinasi dalam melakukan kegiatan pembinaan kasakowil tingkat, pelaksanaan dan kolaborasi masyarakat serta pengabdian dalam rangka kerja bersama	Jumlah dokumen penyusunan laporan pertanggung jawaban ke-10 perguruan tinggi	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	Jumlah perjanjian kolaborasi SKPD dengan instansi lain (Pilih satu TN) serta pemuka agama mengenai 4 kegiatan program dan kegiatan per-yang-tersebut	4 kegiatan	4 kegiatan	100
	Jumlah kegiatan monitoring pemetaan kelayakan	3 kegiatan	3 kegiatan	100
	Jumlah Dokumen Peringatan HUT RI	2 dokumen	2 dokumen	100
	Jumlah pelaksanaan kegiatan penyelarasan Perdes	3 Desa	3 Desa	100
	Jumlah konsep surat tentang Kabupaten dan Kabupaten Uluwatu	10 konsep	10 konsep	100
	Jumlah SOP yang diratifikasi dan disyahkan	3 Desa	3 Desa	100

Tabel 2.4 Percepatan Kinerja dan Anggaran (Dolar per Dosome)

Isaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya fondasi dalam pelaksanaan pembinaan keolahragaan bangsa, peningkatan dan ketertarikan	Jumlah dokumen perencanaan laporan pertanggung jawaban keolahragaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	0	0	
	Jumlah penyajian bahan koordinasi SOPD dengan instansi lain (Poli dan Tni) serta pemula upaya mempromosikan program / kegiatan penyediaan kabin dan/atau alat kesehatan lainnya	4 kegiatan	4 kegiatan	100	0	0	
	Jumlah kegiatan monitoring pembinaan keolahragaan	6 kegiatan	6 kegiatan	100	0	0	
	Jumlah Dokumen Pengajuan IKT RI	6 dokumen	6 dokumen	100	0	0	
	Jumlah pelaksanaan fasilitas penyediaan sarana	6 Desa	6 Desa	100	0	0	
	Jumlah konsep surat belajar Kordinasi/koordinasi keolahragaan lainnya	10 konsep	10 konsep	100	0	0	
	Jumlah SPPT yang diterima dan dibayar	6 Desa	6 Desa	100	0	0	

Dari tabel tersebut dapat diukur progresnya total sumberdaya pencapaian kinerja dan anggaran (COS/PA/2020/940) Kasi Keterseruan dan Kelembutan Usaha Kecamatan Puteh sebagai berikut.

Terdapat pertambahan total sumberdaya pencapaian kinerja dan anggaran (COS/PA/2020/940) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kasi Keterseruan dan Kelembutan Usaha Kecamatan Puteh Realisasinya sebesar 100% dan capaian utapan anggaran sebesar 132%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat efisiensi dalam pencapaian target kinerja.

C. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Sasaran yang akan dicapai Kasi Keterseruan dan Kelembutan Usaha pada Tahun 2025 sejumlah 7 (tujuh) sasaran dengan matriks 7 (tujuh) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut :

1. Indikator Jumlah dokumen perencanaan laporan perencanaan kasus pengajuan karifanah dengan target 1 dokumen terrealisasi sejumlah 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %
2. Indikator Jumlah pelayanan bahan kulinah BKPD dengan instansi lain (Poli dan TNI) serta berakadab agensi mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan kewentuhan dan kelembutan Usaha dengan target kegiatan terrealisasi sejumlah 4 kegiatan sehingga capaiannya 100%.
3. Indikator Jumlah Kegiatan monitoring pemantauan kelayakan dengan target 6 kegiatan terrealisasi sejumlah 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100 %
4. Indikator Jumlah Dokumen Peringatan H/T R/ dengan target 6 dokumen terrealisasi sejumlah 6 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100 %
5. Indikator Jumlah pelaksanaan Siskab penyelenggaraan Perek dengan target 8 dana terrealisasi sejumlah 8 dana sehingga capaiannya sebesar 100 %
6. Indikator Jumlah kasus naras tentang Keterseruan dan Kelembutan Usaha

dengan target 10 korong, terrealisasi sejumlah 91 korong sehingga capaiannya sebesar 100 %

7. Indikator Jumlah SPPT yang diterima dan dibayarkan dengan target 8 desa:

terrealisasi sejumlah 8 desa sehingga capaiannya sebesar 100 %

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (Tujuh) indikator kinerja Kad Kecamatan dan Kabupaten Uluwu Kecamatan Paduli dengan persentase capaian kinerja sebesar 100 % masuk kepada kategori "sangat berhasil". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kad Kecamatan dan Kabupaten Uluwu Kecamatan Paduli yang diungkapkan dalam Rencana Perjanjian Kinerja.

Berikut dengan keterkaitan anggaran Kad Kabupaten dan Kabupaten Uluwu, pengalokasian dibagikan pada pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam DPM kemudian dibenarkan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025, maka dapat dilihat presentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2025

No.	Program	Anggaran		%
		Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
	Peningkatan Efektivitas-Raport Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11.200.000,00	11.200.000,00	100
	Jumlah	11.200.000,00	11.200.000,00	100

Dengan indikator hasil evaluasi dan analisis kinerja menunjukkan bahwa realisasi target sasaran masuk dalam kategori "Berhasil" meskipun namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih ditingkatkan dan ditingkatkan.

D. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja operator. Rencana tindak lanjut yaitu kegiatan pelatihan perlu diprogramkan dalam suatu anggaran, sehingga kegiatan bisa berjalan lancar dan pencapaian sasaran kinerja bisa optimal.

E. Tanggapan Atas Laporan

Tanggapan atas laporan dikemudian hari Laporan Kinerja (LK) Kasi, Kementerian dan Keterlibatan Urusi Komunitas Pabrik Kalimantan Paralelo menguraikan masalah prestasi produksi. Masalah produksi dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat menjelaskan keuletakannya dengan laporan Kasi Kementerian dan Keterlibatan Urusi. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Kementerian dan Keterlibatan Urusi di waktu yang lalu dan prestasi prestasi kerja di waktu yang mendatang.

Bidang Terapan (Dipilih Sesuai Lapangan)

Lulusan yang baik

Lulusan yang baik

Lulusan yang baik

Lulusan yang baik

Lulusan yang baik

Lulusan yang baik dan berprestasi

BAB II PENUTUP

G. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2025 Kesiapan dan Keterampilan dan Keterampilan Urutan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo merupakan laporan yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SKPD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025. Hal Keterampilan dan Keterampilan Urutan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo secara umum menunjukkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengujud perubahan ke strategi Pemerintah Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo).

Adapun status kinerja Hal Keterampilan dan Keterampilan Urutan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo telah berhasil dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian target anggaran sebesar 100 %.

Laporan Kinerja (LKJ) Hal Keterampilan dan Keterampilan Urutan Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Ponorogo, 21 Desember 2025.

Wakil Bupati,
Camat



Sulistiyanto, M.H
Pondok 13/101
Np 19804081980320010

Ket. Translasi
Kecamatan Puduk



Nuruzulwati, S.P.M.S
Pondok 08/1
Np 1981104000121000

LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2025



KECAMATAN PUDAK
PENERINTAH KABUPATEN PONOROGO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Allah SWT karena atas bimbingan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LK) Sekeloa Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Padang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk menyajikan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada masyarakat publik bahwa Kelempahan Masyarakat Kecamatan Padang mempunyai komitmen dan sikap yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berwujud output maupun outcome. Di sisi yang lain laporan ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan di dalam Kesejahteraan Masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, maka laporan ini dapat diolah menjadi indikator dan evaluasi kinerja Kelempahan Masyarakat untuk pelaksanaan program dan kegiatan dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Padang, 31 Desember 2025

Kelempahan Masyarakat
Kecamatan Padang



Dr. Hartati, S.S.
Perata Mula Tk. I (R/II)
Np. 107405802009812004

0401 PENDAHULUAN

B. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Dalam Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pembinaan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyajian bahan dalam rangka pembinaan kesejahteraan masyarakat
2. Penyajian bahan rekomendasi dalam pembinaan atau penyediaan bantuan sosial, kesehatan, bantuan bencana alam;
3. Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan Program dalam upaya pengembangan kesetaraan daerah dan kebudayaan;
4. Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan Program pendidikan, kesehatan, adat istiadat, kebudayaan, pariwisata, perlindungan anak dan perlindungan lingkungan;
5. Penyajian bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan dibidang kesehatan, gizi dan pemenuhan gizi masyarakat;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

BAB 8
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

F. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah dilakukan Rasio Perjanjian Kinerja Kasi Keselamatan Masyarakat Kecamatan Puteh, tanggal 25 Oktober 2025 dengan sasaran. Indikator kinerja dan target sebagaimana diujikan dalam tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran, Indikator dan Target Kasi Keselamatan Masyarakat

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kegiatan partisipator Masyarakat Kecamatan Kemuning Kemuning Kecamatan Puteh	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan	6 Kegiatan
		Jumlah kegiatan keagamaan	6 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan sosial yang diadakan dalam rangka peringatan HUT RI	6 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan seni budaya seni	4 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan olahraga yang diadakan	11 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Kesenian dan seni yang diadakan	0 Kegiatan
		Jumlah Kegiatan Siskamling Masyarakat	24 Dokumen

G. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja KPI Kecamatan Masyarakat Kecamatan Padak Talah 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan ditimbang dengan bobot data yang mendukung dengan standar. Capaian kinerja Untuk setiap sasaran diukur sebagaimana yang teruang dalam dokumen Rencana Pelemparan Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran menggunakan pengukuran sebagaimana tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	70 % sampai dengan 85 %	Baik
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Putak Tahun 2020 sebagai berikut

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Kasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Putak

Esensi Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya kontribusi capaian pembangunan kesehatan Masyarakat	Jumlah kegiatan yang dilakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas	6 kegiatan	6 kegiatan	100
	Jumlah kegiatan kesehatan	6 kegiatan	6 kegiatan	100
	Jumlah kegiatan untuk meningkatkan angka partisipasi 1110	2 kegiatan	2 kegiatan	100
	Jumlah kegiatan untuk rumah sakit	4 kegiatan	4 kegiatan	100
	Jumlah kegiatan lainnya yang dilakukan	11 kegiatan	11 kegiatan	100
	Jumlah kegiatan kesehatan untuk desa/kelurahan	6 kegiatan	6 kegiatan	100
	Jumlah kegiatan untuk kecamatan	24 kegiatan	24 kegiatan	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Outcome)

Sasaran/Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Tercapai	Capaian (%)	Revisi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah kegiatan yang dilakukan penyuluhan ke LK dan unit lain di Kecamatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	0	0	100
	Jumlah kegiatan sosialisasi	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	11.000.000,00	11.000.000,00	100
	Jumlah kegiatan sosial yang dilakukan dalam rangka pengabdian ke 3-12	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100	10.000.000,00	9.000.000,00	100
	Jumlah kegiatan kerja sukarelawan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	0	0	100
	Jumlah kegiatan pelatihan yang dilakukan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100	0	0	100
	Jumlah kegiatan sosialisasi untuk peng. 4-12	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100	0	0	100
	Jumlah kegiatan sosial	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100	0	0	100

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan pencapaian total terhadap pencapaian kinerja dan anggaran (Cost per Outcome) dari Kesepuluh Masyarakat Kecamatan Puduk telah terpenuhi.

Revisi atau pertilangan total terhadap pencapaian kinerja dan anggaran (Cost per Outcome) di atas tidak dapat berdampak bahwa capaian kinerja Kesepuluh Masyarakat Kecamatan Puduk sebesar 100% dan

capaian serapan anggaran sebesar 100%, Hal ini menunjukkan bahwa tercapai efikasi dalam pencapaian target kinerja.

H. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Berdasarkan yang akan dicapai Kode Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Rutak pada Tahun 2022 sejumlah 7 (tujuh) indikator dengan memiliki 4 (empat) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut.

1. Indikator Jumlah Desa yang difasilitasi penyediaan listrik – sesuai dan terjangkau akan dengan target 6 kabupaten terrealisasi sejumlah 6 kabupaten sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Jumlah kegiatan kependidikan dengan target 6 kegiatan terrealisasi 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%.
3. Indikator Jumlah even yang diadakan dalam rangka peningkatan HAJT RI dengan target 8 kegiatan terrealisasi 8 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%.
4. Indikator Jumlah kegiatan seni budaya adat dengan target 4 kegiatan terrealisasi 4 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Indikator Jumlah kegiatan olah raga yang dilakui dengan target 11 kegiatan terrealisasi 11 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%.
6. Indikator Jumlah kegiatan Kacamatan sosial yang difasilitasi dengan target 6 kegiatan terrealisasi 6 kegiatan sehingga capaiannya sebesar 100%.
7. Indikator Jumlah kuesioner surat bertang Kesejahteraan Masyarakat dengan target 24 dokumen – terrealisasi 24 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.

Dari kesimpulan untuk evaluasi terhadap 7 (tujuh) indikator kinerja Kode Kesejahteraan Masyarakat dengan persentase capaian kinerja sebesar 100% sesuai kepada kutipan "Sangat Baik". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kode Kesejahteraan Masyarakat yang diumpani dengan Revolu Perjanjian Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kode Kesejahteraan Masyarakat dilakukan pada papir anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPA kemudian dilaksanakan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2022 maka dapat dilihat persentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 Page Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2025

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	- Penyelenggaraan Efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan	10.000.000,00	10.000.000,00	100
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
	- Pemeliharaan dan Ases Buku dan Intra Buku Urus Sampar, fis dan gajeng lainya yang merupakan abilitas historis	13.580.000,00	13.580.000,00	100

Sementara itu sesuai dan sesuai yang merupakan tahap kedua target sesuai tersebut dalam kategori "Sangat Baik", namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian untuk lebih diperjelas dan ditingkatkan.

I. Rencana Tidak Layak

Rencana tidak layak dan upaya pemeliharaan pemeliharaan yang dapat lebih ditingkatkan dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta pencapaian sesuai yang. Rencana tidak layak tersebut yaitu merupakan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pengalihan pemeliharaan ke desa/desa sesuai sesuai.

J. Tanggapan/Isi Langsung

Tanggapi dalam laporan dengan Laporan Kinerja (LK) Kasi Kesjahteraan Masyarakat Kecamatan Padak Kabupaten Ponorogo menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dapat membantu untuk memahami prestasi kerja secara akurat, walaupun metode ini praktis dan bertandatangan, sehingga hal ini dapat menyajikan ketertarikan dengan jujur. Kasi Kesjahteraan Masyarakat Kecamatan Padak kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Kesjahteraan Masyarakat di waktu yang lalu dan prestasi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

BAB II PENUTUP

6. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Eselon IV Kas Kesjahteraan Masyarakat Kecamatan Pubak Kabupaten Ponorogo merupakan laporan yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) SAKIP di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pubak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021. Sebagai pertanggungjawaban, maka Kas Kesjahteraan Masyarakat Pubak Kabupaten Ponorogo senantiasa melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat menjadi penunjang bu strategi Pemerintah Kecamatan Pubak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kas Kesjahteraan Masyarakat Kecamatan Pubak Kabupaten Ponorogo telah Sangat Baik dengan capaian kinerja sebesar 100% dan capaian dampak anggaran sebesar 90%.

Laporan Kinerja (LK) Kas Kesjahteraan Masyarakat Kecamatan Pubak Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan siklus pemerintahan, pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Mengotakan
Cipta



Novat, SH, MH
Pembina (T/A)
Np: 19080301980031010

Pubak, 31 Desember 2021
Kas Kesjahteraan Masyarakat
Kecamatan Pubak



En Hartika, SE
Pembina Mutasi T/A (P/B)
Np: 197406022008012064

**LAPORAN KINERJA (LKj)
KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KECAMATAN PUDAK
TAHUN 2025**



**KECAMATAN PUDAK
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas bimbingan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja (LK) Balai Pelayanan Umum Kecamatan Padang Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk menunjukkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan ini merupakan laporan akuntabilitas kepada Masyarakat publik bahwa Balai Pelayanan Umum Kecamatan Padang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berorientasi output maupun outcome, disini yang telah laporan ini juga dibuat untuk memberikan gambaran tentang tingkat keterlaksanaan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas-tugas fungsi dan kewenangan di dalam Pelayanan Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja. Sebagai media akuntabilitas kinerja, maka laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Pelayanan Umum melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan pada Rencana Kerja Tahunan, Laporan Kinerja dan Rencana Strategis yang telah ditetapkan.

Padang, 31 Desember 2025

Kai Pelayanan Umum
Kecamatan Padang



Widayati S. Sar
Pusat Mula Teji (PMT)
NIP. 198801302008011004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Tabel	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tujuan Pokok dan Fungsi Jendera	
BAB II MELINDUNGKAN NEGARA DAN DIRI	
A. Pengertian Kinora	
B. Capan Kinora	
C. Evolusi dan Anamnes Kinora	
D. Rentana Tintu Lajur	
E. Tempelan Alas Lajur	
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sesuai Indikator dan Target Hasil Papan dan Pembelajaran Kejurangan Bidang Pendidikan DPK/SD
Tabel 2.2	Skala Ordinal Pergulutan Capan Kinora
Tabel 2.3	Dasar Kinora Hasil Papan dan Pembelajaran Kejurangan Bidang Pendidikan DPK/SD
Tabel 2.4	Pemapan Kinora dan Anggapan (Dial dan Gerakan)
Tabel 2.5	Rasa Anggapan dan Rentana Basaja Lajur TR. 2005

BAB I PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan umum sesuai dengan kewenangan Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

1. Penyajian bahan koordinasi dengan seksi-seksi yang bertanggung jawab rangka pelaksanaan pelayanan umum di Kementerian;
 2. Penyajian bahan dalam rangka pelaksanaan Standar Pelayanan Publik;
 3. Pelaksanaan kegiatan, pendokumentasian dan pemeliharaan rekam jejak pelayanan umum;
 4. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan umum; dan
 5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.
-

BAB II
AKUNTABILITAS KERJA JABATAN

B. Perjanjian Kinerja

Sebagaimana yang telah ditetapkan Revisi Perjanjian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Patak, tanggal 21 Oktober 2025 dengan sasaran, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.1 Sasaran, indikator dan Target Kasi Pelayanan Umum

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatkan kualitas dan responsivitas layanan Pelayanan Umum sesuai dengan standar Komunitas	Jumlah dokumen DPP	1 dokumen
		Jumlah dokumen KCP	1 dokumen
		Jumlah asuhan BK yang terasah	631 asuhan
		Jumlah asuhan Diagnosa Nyeri yang ditetaskan	130 asuhan
		Jumlah asuhan Pengujian AHA Rasio Periode	130 asuhan
		Jumlah asuhan Pengujian AHA Kardial	60 asuhan
		Jumlah asuhan Pelayanan BPOC	100 asuhan
Jumlah Asuhan Kesehatan tentang Kepatuhan	1 asuhan		

C. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Patak Tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang mendukung dengan relevan. Capaian kinerja untuk setiap sasaran diukur sebagaimana yang tertera dalam dokumen Revisi Perjanjian Kinerja dengan berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Untuk memberikan penilaian tingkat

capaian kinerja setiap sektor, menggunakan pengukuran sebagai mana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2 Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 85 %	Sangat Baik
3	70 % sampai dengan 85 %	Baik
2	55 % sampai dengan 70 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pabelan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Pabelan

Nama Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		1	2	
Membantu koordinasi dalam melaksanakan Pelayanan sosial kemasyarakatan	Jumlah dokumen DTP	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah dokumen DCP	1 dokumen	1 dokumen	100
	Jumlah laporan AK yang terakumulasi	50 laporan	50 laporan	100
	Jumlah laporan Dispenda Monev yang dikembalikan	10 laporan	10 laporan	100
	Jumlah Laporan RENCANA PERUBAHAN	10 laporan	10 laporan	100
	Jumlah dokumen RENCANA AKSI	10 dokumen	10 dokumen	100
	Jumlah dokumen RENCANA KEGIATAN	100 dokumen	100 dokumen	100
	Jumlah Laporan Kegiatan Kemasyarakatan	10 laporan	10 laporan	100

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran (Cost per Customer)

Kategori Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Expend (Rp)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan efisiensi pelayanan masyarakat melalui layanan digital, Program Untuk semua kegiatan kemahasiswaan	Jumlah akun email	1 akun	1 akun	100	0	0	0
	Jumlah akun email Polyaner	1 akun	1 akun	100	0	0	0
	Jumlah akun PK yang terakumulasi	100 akun	100 akun	100	0	0	0
	Jumlah akun Disposisi Mail yang ditanggapi	100 akun	100 akun	100	0	0	0
	Jumlah akun Pengajuan Aka Kematian Perilaku	100 akun	100 akun	100	0	0	0
	Jumlah akun Pengajuan Aka Kematian	100 akun	100 akun	100	0	0	0
	Jumlah akun Pelaporan DRCK	100 akun	100 akun	100	0	0	0
	Jumlah Laporan Sistem Informasi	100 laporan	100 laporan	100	0	0	0

Dari tabel tersebut dapat diketahui pencapaian total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (COST PER CUSTOMER) dari Polyaner Untuk sebagai berikut:

Berdasarkan perhitungan total akumulasi pencapaian kinerja dan anggaran (COST PER CUSTOMER) di atas maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Polyaner Untuk Kacamatan Padang sebesar 100 % dan capaian anggaran sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh dibayar dalam pencapaian target kinerja.

D. Evaluasi dan Analisa Kinerja

Saluran yang akan dicapai Kasri Pelayanan Umum pada Tahun 2025 sejumlah 1 (satu) dokumen dengan memiliki 1 (satu) indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

1. Indikator jumlah dokumen SOP dengan target 1 dokumen analisa sejumlah 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%.
2. Indikator jumlah SOP dengan target 1 dokumen analisa 1 dokumen sehingga capaiannya sebesar 100%
3. Jumlah laporan KR yang terakut dengan target 500 laporan analisa 500 sehingga capaiannya 100%
4. Jumlah laporan pengawasan etika yang dibacakan dengan target 150 dokumen analisa 150 dokumen sehingga capaiannya 100%
5. Jumlah laporan pengajuan aksi hukuman Perilaku dengan target 100 dokumen analisa 100 dokumen sehingga capaiannya 100%
6. Jumlah pengajuan aksi hukuman dengan target 50 dokumen analisa 50 dokumen sehingga capaiannya 100%
7. Jumlah dokumen Pelaporan SKDK dengan target 100 dokumen analisa 100 dokumen sehingga capaiannya 100%
8. Jumlah laporan analisa tentang Keabsahan dengan target 12 dokumen analisa 12 dokumen sehingga capaiannya 100%.

Jadi kesimpulan untuk evaluasi terhadap 1 (satu) indikator kinerja Kasri Pelayanan Umum dengan pencapaian capaian kinerja sebesar 100% rasuk kepada kategori "Sangat Baik". Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kasri Pelayanan Umum diwujudkan dalam Renc. Pelemparan Kinerja.

Berkaitan dengan akuntabilitas keuangan Kasri Pelayanan Umum pengalangan dibuktikan pada masa anggaran yang telah ditetapkan dalam DPPK kemudian dilaksanakan dengan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2025 maka dapat dilihat prosentase capaian realisasi anggaran pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Pagu Anggaran dan Realisasi Dinas Lingkungan T.A. 2020

No	Program	Anggaran		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
-	N I K I L	-	-	

Berikan hasil evaluasi dan analisis kinerja menggunakan bentuk matriks target secara terakumulasi dalam kategori "Sangat Buruk", namun ada

berbagai hal yang menjadi perhatian Anda lebih diperjelas dan diperhalus.

E. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka menanggapi pelaksanaan rencana anggaran dan pencapaian sasaran kinerja. Rencana tindak lanjut tersebut yaitu meningkatkan / memperbaiki juga anggaran pada saat Pelaporan Uraun.

F. Tanggapan Atasan Langsung

Tanggapan atasan langsung dalam Laporan Kinerja (LKJ) Kasi Pelayanan Uraun Kecamatan Puduk menggunakan metode penilaian checklist. Metode checklist dapat memberikan suatu gambaran prestasi kerja secara akurat, selaras metode ini praktis dan terstandarisasi, sehingga hal ini dapat meningkatkan keakuratannya dengan menggunakan Kasi Pelayanan Uraun. Penilaian prestasi kerja menghasilkan suatu evaluasi atas prestasi kerja Kasi Pelayanan Uraun di waktu yang lalu dan prestasi prestasi kerja di waktu yang akan datang.

Ruang Tanggapan (Diperoleh) Atasan Langsung

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Sebaiknya diteliti ulang

Cegakan diteliti ulang

Selain itu.....

.....

.....

BAB II PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LK) Daerah IV Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Padak Kabupaten Ponorogo merupakan langkah yang baik sebagai pra evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DPRD di lingkungan Pemerintah Kecamatan Padak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025, maka Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Padak Kabupaten Ponorogo bersedia menjalankan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat mengaiti perubahan, as. strategi Pemerintah Kecamatan Padak Kabupaten Ponorogo.

Adapun capaian kinerja Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Padak Kabupaten Ponorogo di era Digital Bertarif dengan capaian kinerja sebesar 100 % dan capaian rencana anggaran sebesar 0%.

Laporan Kinerja (LK) Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Padak Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mempersiapkan dokumen perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan di periode yang akan datang.

Wagubah,
Cantel



Sunek Satrio, M.H.
Pembina (N/A)
Np. 19680602196001010

Ponorogo, 27 Desember 2025

Kasi Pelayanan Umum
Kecamatan Padak

Willyanto, S.P.
Pemada Muda Tg J (R/0)
NIP. 198812032008211004

SAB I PENDAHULUAN

Laporan Kerja Pengadministrasian umum pada Sekelompok Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Padak disebut untuk memberikan informasi yang akurat atas Capaian Kinerja dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan kerja melalui berkemampuan untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai pemetaan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan kepada atas pejabat publik yang ditunjuk dalam Laporan Kerja Tahun 2023.

Pengadministrasian Umum pada Sekelompok Umum (Pengolah Data Pelayanan) memiliki tugas : Melakukan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan di bidang data Pelayanan, agar pelaksanaan tugas di Sekelompok Umum Kecamatan Padak bisa berjalan lancar.

**DAFTAR
AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN**

A. PENJUALAN KIBENJA

Penjualan Kinerja Pengadministrasian umum pada Seksi Pelayanan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Pulo sebagai berikut terdapat dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah data kependudukan	1 orang
		Jumlah data kependudukan	1 orang
		Jumlah laporan MK yang terakumulasi	800 laporan
		Jumlah laporan Disposisi Mula yang ditindak	100 laporan
		Jumlah laporan Disposisi Akhir Revisi Perbaikan	100 laporan
		Jumlah laporan Disposisi Akhir Penyelesaian	50 laporan
		Jumlah laporan Disposisi DOK	100 laporan
		Jumlah laporan Disposisi yang ditindaklanjuti	12 laporan

E. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Perusahaan adalah uraian pada Data Pelaksanaan Urutan (Fasilitas) Data pelayanan Perusahaan-Pusat dilakukan dengan cara meningkatkan secara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja secara serentak dengan data-data yang mendukung dengan standar.

No	Essensi Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tertanggap Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah keluhan SIP	1 keluhan	1 keluhan	100
		Jumlah keluhan SIP	1 keluhan	1 keluhan	100
		Jumlah laporan PK yang terakumulasi	000 laporan	000 laporan	100
		Jumlah laporan Disposisi Hasil yang ditambal	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah laporan Terganggu Adu Kabinan Perdukasi	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah laporan Terganggu Adu Kabinan	88 laporan	88 laporan	100
		Jumlah laporan Pelayanan DUK	100 laporan	100 laporan	100
		Jumlah laporan Disposisi tentang Rekomendasi	12 laporan	12 laporan	100

E. TINDAKAN ATASAN LAINNYA

Tindakan atasan saya
yang telah baik

BAB III PENUTUP

D. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Pergadestribesal Unsur pada Sekel Pelayanan Unsur (Pelayanan Jasa Pelayanan KecamatanPudak sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pergadestribesal Unsur pada Sekel Pelayanan Unsur KecamatanPudak.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian residual kinerja tahun 2025 semua indikator kinerja capaian kinerjanya dengan kelikid baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu tingkat meningkatkan koordinasi dalam penyelesaian penyusunan Anjaq Mh. Perangal Dewah dan penyusunan Perbus Perangal Kertagagan Perangal Dewah agar dapat menyelesaikan lebih waktu dari issues dengan ketahanan yang terbaik.

Mengucapkan,
Kasi Pelayanan Unsur
KecamatanPudak.



Widyono, S.Si
Pangkat MadyaTn. (1886)
Np. 196801302006011904

Ponorego, 31 Desember 2025
Pergadestribesal Atas nama
KecamatanPudak.



Sunemo
Pangkat Tn. (1886)
Np. 196409172006011901

SAB I PENDAHULUAN

Laporan Kerja Pengadministrasian umum pada Sekelompok Pekerjaan Umum (Pengolah Data Pelayanan) Kecamatan Puduk dibuat untuk memberikan informasi yang akurat atas Capaian Kinerja dan mewujudkan akuntabilitas serta bertujuan untuk upaya perbaikan kerja melalui berkolaborasi untuk peningkatan kinerja. Selain itu juga berfungsi sebagai pemetaan dari pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilaksanakan kepada atasan, publik yang ditampung dalam Laporan Kerja Tahun 2023.

Pengadministrasian Umum pada Sekelompok Pekerjaan Umum (Pengolah Data Pelayanan) memiliki tugas : Melakukan kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan di bidang data Pelayanan, agar pelaksanaan tugas di Sekelompok Pekerjaan Umum Kecamatan Puduk bisa berjalan lancar.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA DAN JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pengantar/Instansi urusan pada Sektor Pelayanan Umum (Perjanjian Data Pelayanan) Kecamatan Pulaok selanjutnya terdapat dalam Laporan Kinerja Tahun 2020 dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Data Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kunjungan Dukumen SIP	1 Kunjungan
		Jumlah Kunjungan MK yang terlaksana	100 Dukumen
		Jumlah Kunjungan Pemahaman GAK	100 Dukumen
		Jumlah Kunjungan Dukumen SIP	17 Kunjungan
		Jumlah Dukumen Rekomendasi Peningkatan yang diwujudkan	30 Dukumen
		Jumlah Kunjungan Sesi tentang Pelayanan Umum	100 Kunjungan Pelayanan Umum

B. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Penguji/Intelektual sesuai pada Setiap Penerimaan Urutan (Peringkat Data pelayanan) Kecamatan Pucallpa dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja sesuai dan didukung dengan data data yang mendukung dengan sasaran.

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tersedianya Data Penerimaan Masyarakat	Jumlah Koneksi Dokumen	1 Koneksi	1 Koneksi	100
		Jumlah Laporan MK yang	100 Dokumen	100 Dokumen	100
		Jumlah Laporan Pelayanan	10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Jumlah Nomor Dokumen	17 Nomor	17 Nomor	100
		Jumlah Dokumen Referensi Prodi yang diterbitkan	10 Dokumen	10 Dokumen	100
		Jumlah Nomor Surat tentang Penerimaan Urutan	100 Nomor	100 Nomor	100

E. TANGKAPAN ATAS LINGKUNGAN

Inspirasi saya
yang sudah baik

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Pengadvisasian Urus pada Sekel Pelayanan Urus (Pegawai Das. Pelayanan) Kecamatan Pudu, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja dari Pengadvisasian Urus pada Sekel Pelayanan Urus Kecamatan Pudu.

Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian rencana kinerja tahun 2023 sesuai indikator kinerja capaian kimanya dengan kriteria baik (100%).

Langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang yaitu dengan meningkatkan koordinasi dalam penyusunan penyusunan Aspek Aspek Peningkat Hasil dan penyusunan Perencanaan Kegiatan Peningkat Daerah agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ponorogo, 31 Desember 2023

Pengadvisasian Urus

Wakil Kepala
Kecamatan Pudu



Widyadhi, S.Si
Pondok Maja T.1 (81)
Hp 0850113203011004



Pang
Pengadvisasian Urus
No 08770813204011007

